

**STRATEGI KETAHANAN PANGAN DALAM Mendukung
PERKEMBANGAN EKONOMI DI KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Ekonomi Pembangunan (S.P)*



Oleh:

NAMA : RAHMAT GUSTIADI
NPM : 1405180007
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : RAHMAT GUSTIADI
NPM : 1405180007
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : STRATEGI KETAHANAN PANGAN DALAM Mendukung
PERKEMBANGAN EKONOMI DI KABUPATEN ACEH
BARAT DAYA

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(SRI ENDANG RAHAYU, SE, M.Si)

Penguji II

(MUKMIN POHAN, SE, M.Si)

Pembimbing

(HASTINA FEBRIATY, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, SE, M.Si)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

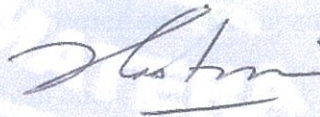
Skripsi ini disusun oleh :

Nama : RAHMAT GUSTIADI
N.P.M : 1405180007
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : STRATEGI KETAHANAN PANGAN DALAM
MENDUKUNG PERKEMBANGAN EKONOMI DI
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi



HASTINA FEBRIATY, SE, M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



H. JANURI, SE., MM., M.Si

ABSTRAK

Strategi Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Perkembangan Ekonomi Di Kabupaten Aceh Barat Daya. Ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam menyediakan pangan bagi seluruh penduduk, terutama yang berasal dari produksi dalam negeri, dalam jumlah dan keragaman yang cukup, aman, dan terjangkau. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka diperlukan suatu strategi dalam meningkatkan ketahanan pangan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui Badan Ketahanan Pangan Pelaksana dan Penyuluhan (BKP3) untuk melihat bagai mana perkembangan produksi padi dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Barat Daya untuk peningkatan ketahanan pangan daerah melalui pengembangan lumbung pangan, mempercepat pangan kekaragaman konsumsi pangan dan gizi, membentuk Dewan Ketahanan Pangan, pengembangan desa mandiri pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah sesuai aspek-aspek ketahanan pangan.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan kepada penguasa alam semesta Allah SWT yang telah member rahmad dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul' **Strategi Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Perkembangan Ekonomi Di Kabupaten Aceh Barat Daya'** skripsi ini sebagai syarat menepuh gelar sarjana program studi ekonomi pembangunan di Universita Muhammadiyah Sumatra Utara

Dalam skripsi ini saya menyadari jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan di karna kan oleh keterbatasan dan kemampuan saya yang saya miliki, namun saya berusaha untuk mengerjakan skripsi ini sebaik-baik nya agar mamfaat bagi saya pribadi dan orang lain, oleh karna itu saya akan terima kritik dan saran yang membangun dan memotivasi saya dalam perbaikan skripsi ini.

Dalam menjalan kan pembuatan skripsi ini saya dapat banyak bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, sehingga skripsi ini dapat di selesaikan pada kesempatan ini penulisahan hati mengucapkan beribu ribu terimaakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan fisik dan pikiran sehingga saya dapat mengerjakan skripsi ini.
2. Orangtua Tercinta Ibu SURIATI Dan Ayahanda RIDHWAN Yang Selalu Menemani Dan Memberikan Doa Dan Dukungan Agar Saya Dapat Menyelesaikan Studi Saya.
3. Ibuk HASTINA FEBRIANTY,SE.,M.SI Selaku Dosen Pembimbing Saya Yang Telah Meluangkan Waktu, Tenaga, Dan Pikiran, Nya Untuk

Membimbing Saya Dan Memotivasi Saya Agar Tidak Pernah Menyerah Sebelum Berperang.

4. Ibuk Dr.PRAWIDYA HARIANI RS,SE.,M.SI Selaku Pembanding Dan Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan Saya, Yang Selalu Mengajarkan Saya Untuk Lebih Baik.
5. Dra.Hj.ROSWITA HAFNI,M.SI Selaku Sektaris Prodi .
6. H.JANURI,SE.,MM.,M.SI Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
7. Buat Sahabat-Sahabat Saya Fera, Raisul, Una, Reza, Haifa, Restu, Petra, Zulhadi, Arid, Angga, Saya Mengucapkan Beribu Ribu Terimakasih Atas Dukungan Dan Bantuan Selama Saya Mengarjakan Skripsi.
8. Dan Buat Kamu Orang yang Istimewa CICI Terimakasih Atas Bantuan Yang Tidak Bisa Dinilai Dari Apa Pun Insya allah Bakal Di Ingat Kebaikan Nya.
9. Dan Buat Teman Teman Seangkatan Tahun 2014 Terima Kasih Persahabatan Dan Kontibusi Yang Kalian Berikan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Batasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi	11
2.2. Teori Pendapatan Nasional	11
2.3. Ketahanan Pangan.....	16
2.4. Teori Produksi.....	19
2.5. Penelitian Terdahulu	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Pendekatan Penelitian.....	37
A. Definisi Operasional Variabel	37
B. Tempat dan Waktu Penelitian	37
C. Jenis dan Sumber Data	37

D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Hasil Penelitian	39
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Barat Daya	39
4.2 Kondisi Demografis Kabupaten Aceh Barat Daya	40
4.3 Perkembangan Produksi Padi Dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Kabupaten Aceh Barat Daya.....	43
BAB V PENUTUP	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nilai tukar petani nasional 2012-2017	4
Tabel 2 Perkembangan NTP per Wilayah di Indonesia, 2012-2017	4
Table 3 Jumlah produksi tanaman pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2016 (Ton)	7
Table 4 Perkembangan luas sawah dan sawit rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2017	8
Tabel 4.1 Nama, Luas Wilayah per Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Aceh Barat Daya	42
Tabel 4.2 Perkembangan Ketahanan Pangan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2017	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Grafik perkembangan jumlah produksi dan luas panen tanaman pangan jenis jagung Kanupaten Aceh Barat Daya tahun 2013-2017	45
Grafik4.2 perkembangan jumlah produksi dan luas panen tanaman pangan jenis kacang hijau Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2017	47
Grafik4.3 perkembangan jumlah produksi dan luas panen tanaman pangan Jenis kacang Tanah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2017	48
Gambar 4.4 perkembangan jumlah produksi dan luas panen tanaman pangan jenis Kedelai Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2017	49
Gambar 4.5 perkembangan jumlah produksi dan luas panen tanaman pangan jenis singkong Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2017.....	50
Gambar 4.6 perkembangan jumlah produksi dan luas panen tanaman pangan jenis ubi Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2017.....	51
Gambar 4.7 perkembangan jumlah produksi dan luas panen tanaman pangan jenis Padi Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2017	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan tahapan proses yang mutlak dilakukan oleh suatu bangsa untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat bangsa tersebut. Pembangunan ekonomi suatu negara tidak dapat hanya dilakukan dengan berbekal tekad yang membaja dari seluruh rakyatnya untuk membangun, tetapi lebih dari itu harus didukung pula oleh ketersediaan sumberdaya ekonomi, baik sumberdaya alam; sumberdaya manusia; dan sumberdaya modal, yang produktif. Dengan kata lain, tanpa adanya daya dukung yang cukup kuat dari sumberdaya ekonomi yang produktif, maka pembangunan ekonomi mustahil dapat dilaksanakan dengan baik dan memuaskan.

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian seluruh negara mengingat pengaruhnya terhadap pembentukan iklim yang kondusif. Ketahanan pangan tidak hanya terkait dengan kecukupan ketersediaan pangan, tetapi juga akses terhadap bahan pangan, dan pada tahapan yang lebih maju terkait dengan tingkat keamanan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk memetakan ketahanan tanaman pangan di masing-masing provinsi dengan menggunakan sebagai ukuran dari tingkat adopsi teknologi serta memetakan tingkat ketahanan pangan tiap provinsi dengan menghitung indeks berdasar ketersediaan, akses, dan tingkat keamanan bahan pangan, yang mengacu pada perhitungan Global Food Security Index.

Ketahanan pangan merupakan isu pokok dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat karena akan menentukan kestabilan ekonomi, sosial, dan politik dalam

suatu negara. Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Luas wilayah Indonesia secara geografis menjadi penyebab adanya perbedaan kondisi tanah dan kecocokan terhadap jenis-jenis tanaman termasuk tanaman pangan. Perbedaan budaya bercocok tanam dan makanan pokok antar daerah juga memengaruhi pilihan masyarakat dalam memilih komoditas petani. Badan Ketahanan Pangan telah menyusun peta ketahanan dan kerawanan pangan di Indonesia. Dari peta tersebut dapat dilihat bahwa daerah yang masuk dalam kategori tahan pangan (warna hijau) didominasi oleh wilayah Jawa dan Sumatera, sementara daerah rawan pangan didominasi oleh Indonesia wilayah timur.

Komoditas pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Untuk itu, pemenuhannya harus disegerakan. Dalam kaitan ini, kelambatan pemenuhan pangan akan menyebabkan harga pangan tinggi dan bergejolak (volatilitas tinggi). Hal ini tentunya akan berimplikasi pada sulitnya mengendalikan harga dan menurunkannya kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, komoditas pangan menyumbang peran cukup besar pada inflasi. Dari beberapa komoditas utama penyumbang inflasi 15 diantaranya merupakan komoditas pangan. Dengan kata lain, ketidakstabilan harga komoditas pangan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh permasalahan supply.

Ketidakstabilan harga pangan di Indonesia juga disebabkan oleh sifat komoditas pangan yang musiman dan sangat terpengaruh oleh kondisi alam seperti tanah, perubahan musim, dan juga letak geografis daerah. Faktor-faktor ini akan memengaruhi ketersediaan stok tiap bulannya. Pada musim panen *supply* meningkat, sehingga harga relatif rendah. Namun, pada saat musim paceklik atau di luar musim panen stok menjadi terbatas. Selain itu, permasalahan distribusi

juga menjadi hambatan tersendiri pada masalah transportasi barang antardaerah. Panjangnya rantai pemasaran komoditas pangan juga menyebabkan ketidakefisienan dalam pemasaran barang dan menyebabkan tingginya harga barang komoditas pangan.

Dari perhitungan yang dilakukan pada rata-rata TFP tanaman pangan (padi, kedelai, cabai merah, bawang merah) di 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2016-2017 dapat disimpulkan bahwa tingkat adopsi teknologi di sektor pertanian adalah 1,05. Hasil ini menunjukkan masih kecilnya dampak penggunaan teknologi terhadap produktivitas tanaman pangan. Dengan kata lain, adopsi teknologi di tingkat petani masih relatif rendah. Untuk indeks ketahanan pangan, rata-rata indeks dari seluruh provinsi adalah 37,26 dari nilai maksimal 100. Hal ini menunjukkan masih perlunya perbaikan di tiga sisi ketahanan pangan (ketersediaan, akses, stabilitas dan keamanan). Tiga provinsi dengan indeks ketahanan pangan tertinggi adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Untuk hasil per kawasan, Jawa merupakan kawasan dengan indeks ketahanan pangan tertinggi, sementara Indonesia bagian timur merupakan kawasan dengan indeks ketahanan pangan terendah. (kompas.com)

NTP berfluktuasi dari waktu ke waktu tergantung dari perkembangan harga barang yang dijual petani dan barang serta jasa yang dikonsumsi petani. Pada Tabel 1 diuraikan, perkembangan NTP di tingkat nasional tahun 2012–2017. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, NTP Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat, bahkan data NTP sejak tahun 2012–2017 mempunyai nilai lebih dari 100. Hal ini berarti bahwa petani mengalami surplus, yakni harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya sehingga pendapatan petani

mengalami kenaikan lebih tinggi dari pengeluarannya. Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan petani menjadi lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya. Diharapkan ke depan, tingkat kesejahteraan petani semakin meningkat seiring dengan dilakukannya penguatan perekonomian perdesaan dan peningkatan nilai tambah produk pertanian. Selama periode 2012–2017, NTP mengalami pertumbuhan sebesar 0,29% setiap tahun. Apabila dibandingkan pertumbuhan NTP antarperiode, maka pertumbuhan terbesar pada periode tahun 2012–2017, yaitu 0,78% per tahun. Sementara itu, pertumbuhan pada periode tahun 2012–2013 hanya 0,04% per tahun.

Tabel 1. Nilai tukar petani nasional, 2012-2017

Tahun	Nilai tukar petani	Pertumbuhan/tahun
2012	100,15	0,15
2013	99,86	-0,29
2014	101,77	1,87
2015	104,58	2,69
2016	104,13	-0,43
2017	102,97	-1,13
Rata-rata	99,99	0,29

Sumber: BPS (2012-2017), diolah

Pada Tabel 2 dapat dilihat perkembangan NTP antarwilayah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Data agregat nasional menunjukkan kenaikan NTP dari 100,2 pada tahun 2012 menjadi 103,0 pada tahun 2017 atau meningkat sebesar 2,81%.

Tabel 2. Perkembangan NTP per Wilayah di Indonesia, 2012–2017

Wilayah	2012	2017	Perkembangan (0%)
Sumatra	101,8	103,3	1,47
Jawa	99,8	108,6	883

Bali + nusa tenggara	98,5	100,2	174
Kalimantan	100,3	99,2	-112
Sulawesi	101,8	102,6	076
Maluku + papua	101,9	101,5	-047
Indonesia	100,2	103,0	2,81

Sumber: BPS (2012, 2017), diolah

Pada periode 2012–2017 tersebut sebagian besar wilayah mengalami kenaikan NTP, kecuali di wilayah Kalimantan serta wilayah Maluku dan Papua mengalami penurunan NTP masing-masing sebesar 1,12% dan 0,47%. Wilayah dengan pertumbuhan NTP terbesar dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 adalah wilayah Jawa dengan pertumbuhan 8,83% di atas rata-rata pertumbuhan NTP nasional. Untuk wilayah lainnya, kecuali Kalimantan serta Maluku dan Papua, tingkat pertumbuhannya relatif kecil, yaitu sekitar 1%. (BPS Nasional)

Data agregat nasional tahun 2017 menunjukkan NTP Indonesia sebesar 102,93%, dan pada sebagian besar provinsi mempunyai NTP lebih besar dari 100% (Gambar 1). Provinsi dengan NTP terbesar adalah Lampung dan DI Yogyakarta masing-masing sebesar 123% dan 116%. Pada tahun yang sama NTP Provinsi Jambi dan Nusa Tenggara relatif kecil dibandingkan dengan provinsi lainnya yaitu masing-masing 89,48% dan 94,61%. (BPS 2017)

Dinamika NTP nasional bulanan periode 2012 dan 2017 dapat dilihat pada Tabel 3. Pertumbuhan NTP relatif besar terjadi pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni, berkisar antara 3,01% sampai 4,59%. Pada bulan Juli sampai dengan September dan bulan Desember, pertumbuhan NTP lebih kecil berkisar antara 0,24% sampai 1,75%. (BPS 2017)

Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi tanaman pangan khususnya padi dan palawija di Provinsi Aceh. Daerah

ini sangat subur dan banyak penduduknya menggantungkan pekerjaannya dari hasil pertanian, sehingga peran sektor ini sangat penting. Sektor pertanian dengan segala kelebihan dan kekurangannya masih menjadi tumpuan masyarakat sebagai mata pencaharian utama dan masih sebagai sektor andalan. Hasil pertanian tanaman pangan merupakan komoditi yang sangat strategis karena menyangkut kebutuhan pokok masyarakat, dalam upaya meningkatkan pembangunan ketahanan pangan, peranan kelembagaan kelompok tani di pedesaan sangat besar dalam mendukung dan melaksanakan berbagai program. Baik program yang sedang dilaksanakan maupun program yang akan dilaksanakan karena kelompok tani inilah pada dasarnya pelaku utama pembangunan ketahanan pangan.

Pada rencana strategi pembangunan ekonomi di kabupaten aceh barat daya (2013-2017) telah di gariskan berbasis ekonomi kerakyatan. Oleh karna itu semua potensi sumberdaya (baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia), di gerakkan dalam landasan ekonomi kerakyatan. Penggunaan lahan pertanian secara luas (subsektor pertanian pangan, perkebunan, perternakan, perikanan dan kehutanan) di rancang untuk perkembangan pertanian rakyat. Di identifikasi usaha tani yang di kelola oleh rakyat yang ada saat ini (kondisi eksisting) dan potensi pengembangannya pada masa yang akan datang. Lebih lanjut perlu juga dilakukan pemetaan (mapping) komoditas andalan masyarakat masing masing subsektor pertanian wilayah sentra pertanian. Demikian juga dengan sistem perdangan yang di kembangkan dengan konsep ekonomi kerakyatan. Sistem perdangan komoditi andalan masyarakat yang telah ada saat ini (baik yang telah berizin maupun belum izin milik usaha), dan potensi pengembangannya pada masa yang akan datang.

Tabel 4, jumlah produksi tanaman pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2016 (Ton)

No	Tanaman pangan	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Padi	172.651	77.079	159.406	96.641.60
2	Kacang tanah	233.88	364.47	96.83	94.65
3	Kacang hijau	13.83	49.07	13.84	-
4	Jagung	85.74	1.344.28	526.50	10.729.14
5	Kedelai	13.83	82.84	-	728.38
6	Ubi kayu	267.50	437.88	251.24	121.72
7	Ubi jalar	304.44	586.92	515.70	398.41

Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah produksi tanaman pangan terbanyak yaitu pada tanaman padi sebanyak 96.641.60 ton pada tahun 2016 dan 2013, 172.651 ton pada tahun 2014, dan ubi jalar sebanyak 77.079 ton pada tahun 2015 dan 159.406 ton pada tahun 2013. Sedangkan pada tanaman pangan yang lebih tua yaitu padi hanya mencapai angka 6.18 ton pada tahun 2008 dan 6.41 ton pada tahun 2012 ini menunjukkan kecilnya jumlah produksi padi pada Provinsi Aceh, sedangkan Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan daerah dengan produksi padi terbesar di Provinsi Aceh.

Terkait dengan data luas lahan dan ladang pertanian yang ditanaminya menurut pengairan untuk masa panen tahun 2013-2016. Rincian data luas lahan setiap kecamatan yakni, kecamatan Babahrot luas lahannya 1,050 hektare, Kuala Bate 151, Jeumpa 1.306, Susoh 1.168, Blangpidiee 836, Setia 1.148, Tangan-tangan 1.700, Manggeng 1.232 dan kecamatan Lembah Sabil 587 hektare.

Jumlah penduduk menurut BPS Kabupaten Aceh Barat Daya belum memiliki akte kelahiran. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengatakan jumlah penduduk abdiya per 29 Desember sebanyak 158.322. Jika dilihat dari akte kelahiran sebanyak 70% atau 104.731 orang, jumlah anak usia 0

hingga 18 tahun sebanyak 52.004 namun yang sudah dimiliki akte kelahiran 35.213. (BPS 2017)

**Perkembangan Luas Sawah dan Sawit Rakyat
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013– 2017**

Tahun	Padi Sawah		Sawit Rakyat	
	Luas (ha)	Produksi (ton)	Luas (ha)	Produksi (ton)
2013	72.044	347.473	11.865,86	148.815,38
2014	73.534	364.876	12.075,49	149.260,00
2015	63.584	328.344	12.281,74	146.620,00
2016	68.355	369.190	12.485,47	156.720,96
2017	71.748	394.793	12.573,93	160.333,74

Sumber :Aceh Barat Daya Dalam Angka, 2013-2015

Dilihat dari tabel di atas, luas lahan sawah di Kabupaten Aceh Barat Daya pada periode 2013 – 2017 mengalami perkembangan yang fluktuatif, dimana pada tahun 2013 luas lahan sawah yakni 72.044 ha kemudian turun secara signifikan pada tahun 2015 menjadi 63.584 ha sedangkan luas perkebunan kelapa sawit rakyat semakin bertambah dari tahun 2013 luas kelapa sawit rakyat seluas 11.865,86 ha menjadi 12.573,93 ha, berkurangnya luas panen padi sawah di Kabupaten Aceh Barat Daya disebabkan terjadinya alih fungsi lahan dari lahan pertanian pangan ke penggunaan perkebunan kelapa sawit.

Melihat kondisi jalan yang semeraut di ibu kota abnya dari dulu hingga sekaranglah jauh dari insprastruktur kota dari beberapa kabupaten yang mekar pada tahun yang sama, setelah beberapakali berganti bupati belum ada perubahan jalan dan belum terlihat di bangun jalan 2 jalur.

Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang "Strategi Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Perkembangan Ekonomi Di Kabupaten Aceh Barat Daya"

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, terdapat beberapa masalah yang muncul, yaitu:

1. Tahun 2016-2017 di Indonesia terjadi peningkatan harga beras secara nasional tetapi tidak meningkatkan nilai tukar petani
2. Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan salah satu di Kabupaten Aceh menghasilkan produksi pertanian yang cukup besar.
3. Pada lima tahun terakhir terjadi peningkatan konversi lahan dari tanaman pangan menjadi perkebunan sawit dalam bentuk korporasi

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi penelitian dalam ketahanan pangan yaitu pada produksi tanaman pangan padi, dari tahun 2012-2017.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perkembangan produksi padi dalam mendukung ketahanan pangan di kabupaten Aceh Barat Daya
2. Bagaimana konversi lahan tanaman padi ke perkebunan sawit dalam mendukung ketahanan pangan di kabupaten Aceh Barat Daya

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Bagaimana perkembangan analisis perkembangan produksi padi dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Bagaimana perkembangan analisis tentang konversi lahan tanaman padi ke perkebunan sawit dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Barat Daya

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini di jadikan masukkan yang bermamfaat untuk mengambil kebijakan, terutama yang berkaitan dengan ketahanan pangan di aceh melalui petani.
2. Bagi lembaga pendidikan, hasil penelitian ini berguna untuk memberikan informasi kepada masyarakat petani untuk meningkatkan produksi pertanian nya dalam mempertahankan ketahanan pangan aceh, khusus nya kabupaten aceh barat daya.
3. Bagi penulis berikut nya, hasil penelitian ini bisa di jadikan bahan kajian yang lebih luas lagi guna menyempurnakan penelitian tentang analisis kebijakan ketahanan pangan dalam meningkatkan produksi pertanian di kabupaten aceh barat daya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasa Teori

2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Klasik Dan Neo Klasik yaitu: **Adam Smith**: melihat bahwa suatu perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada penambahan penduduk yang akan memperluas pasar serta mendorong spesialisasi. Munculnya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas pekerja dan mendorong kemajuan teknologi hingga pertumbuhan ekonomi. (Josohardjono, 2003)

David Ricardo: Bila Adam Smith berpendapat seperti di atas, maka David Ricardo sebaliknya. Ia berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu besar bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Tenaga kerja yang melimpah menyebabkan upah yang diterima masing-masing menurun, di mana upah tersebut hanya bisa untuk membiayai tingkat hidup minimum (*subsistence level*). Pada tahap ini, perekonomian mengalami stagnasi (kemandegan) yang disebut *stationary state*. (Josohardjono, 2003)

Thomas Robert Malthus: Untuk mengemukakan bahwa bahan makanan bertambah menurut deret hitung (1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya), sedangkan penduduk bertambah menurut deret ukur (1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya). Akibatnya, bahan makanan tidak cukup untuk menghidupi penduduk (akan terjadi kelaparan), sehingga masyarakat hidup pada tingkat subsistence (pas-pasan) dan perekonomian mengalami kemandegan. (Josohardjono, 2003)

2.2.1 Teori Pendapatan Nasional

Menjumlahkan seluruh pendapatan Agregat yang diterima selama satu tahun oleh mereka yang memproduksi output tersebut. “pada paruh kedua abad ke-18 *francois quesney* adalah yang pertama kali mengukur aktivitas ekonomi atas dasar aliran. Pada tahun 1758 dia mempublikasikan *tableau economique*, yang membahas circular flow output dan pendapat pada berbagai sektor dalam perekonomian. Pandangannya mungkin terinspirasi dari pengetahuan tentang aliran memutar atau *circular flow* dalam tubuh, *quesney* adalah dokter resmi resmi bagi king louis xv dari prancis

Ukuran besar dari pendapatan nasional dikembangkan di inggris sekitar dua abad yang lalu, tetapi perhitungan rinci untuk data ekonomi mikro dikembangkan di amerika selama *the great depression*. Hasil berupa sistem perhitungan pendapatan nasional mencakup sejumlah besar data yang di himpun dari berbagai sumber di amerika sarikat. Data tersebut di rakit menjadi kerangka yang saling terkait, dan kemudian di laporkan secara periode oleh pemerintah federal. perhitungan pendapat nasional amerika adalah yang paling luas di laporkan dan yang paling di amati di seluruh dunia, Simon Kuznets sebagai salah satu pengembangan perhitungan tersebut memperoleh penghargaan hadiah nobel.

Perhitungan pendapatan nasional adalah berdasarkan ide bahwa belanja seseorang menjadi pemerintah orang lain. Ide bahwa belanja sama dengan permintaan di ungkapkan dalam sistem pembukuan *double-entry*, sehingga pada output agregat dicatat pada sisibuku dan pendapatan dari sumber daya dicatat pada sisi lainnya. GDP dapat diukur dengan belanja total pada produksi belanja amerika atau dengan pendapatan total yang diterima dari produksi tersebut. Pendekatan pengeluaran penjumlahan seluruh pengeluaran menjumlahkan seluruh

pengeluaran agregat pada seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi selama satu tahun. Pendekatan pendapatan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima selama satu tahun oleh mereka yang memiliki output tersebut.

$$Y = e + C + G + X - M.$$

a. Metode Perhitungan GDP Berdasarkan Pendapatan

Pendekatan pengeluaran menjumlahkan atau mengagregasikan pendapatan dari suatu produksi. Sistem pembukuan double-entry dapat memastikan bahwa nilai output agregat sama dengan pendapatan agregat yang dibayarkan untuk sumber daya yang digunakan dalam produksi output tersebut upah, bunga, sewa dan laba dari produksi. Harga Hershey bar mencerminkan pendapatan yang diterima semua pemilik sumber daya sehingga batang permen tersebut sampai dirak grosir. Pendapatan agregat sama dengan semua penjumlahan pendapatan yang diterima semua pemilik sumber daya dalam perekonomian (karena sumber dayanya di gunakan dalam proses produksi). Jadi kita dapat mengatakan bahwa pengeluaran agregat = GDP = pendapatan agregat.

Suatu produk jadi biasanya proses oleh beberapa perusahaan dalam perjalanannya menuju konsumen. Meja kayu. Misalnya, mulanya sebagai kayu mentah, kemudian di potong oleh perusahaan pertama, di potong sebagai kebutuhan mabel oleh perusahaan kedua, dibuat meja oleh perusahaan ketiga, dan dijual oleh perusahaan ke empat. Double counting di hadiri dengan caranya memperhitungkan nilai pasar dari meja pada saat dijual kepada pengguna atau dengan cara menghitung nilai tambah dari setiap perusahaan sama dengan harga jual perusahaan tersebut dikurangi dengan jumlah yang dibayar atas input dari perusahaan lain. Nilai tambahan setiap tahap mencerminkan nilai tambah pada

semua tahap produksi sama dengan nilai pasar barang akhir, dan penjumlahan nilai tambah seluruh barang dan jasa akhirnya adalah sama dengan GDP berdasarkan pendekatan pendapatan. Rumus :

$$Y=R+W+I+P$$

dimana: y = pendapatan nasional

r = rent =sewa

i =interest = bunga modal

w =wage = upah/gaji

p = profit =laba

b. Metode perhitungan GDP berdasarkan produksi

Metode pendekatan produksi adalah metode perhitungan pendapatan nasional pertama yang akan kita bahas. Dalam metode ini dijelaskan bahwa perhitungan pendapatan nasional di hitung dari penjumlahan seluruh hasil produksi suatu produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan ataupun diperoleh dari seluruh pelaku kegiatan ekonomi tertentu kurang lebih tiap tahun sekali. Cara menghitung pendapatan nasionalnya yaitu dengan mengalikan jumlah seluruh produk baik barang ataupun jasa yang dihasilkan atau diproduksi dalam kurun waktu satu tahun dengan harga satuan tiap produknya bisa berbentuk barang maupun jasa. Misalnya dalam setahun itu produk baik barang maupun jasa yang bisa diproduksi berjumlah seribu produk, maka hal tersebut harus dikalikan dengan harga satuan yang mereka miliki untuk mendapatkan jumlah atau besarnya pendapatan nasional negara tersebut dalam satu tahunnya.

Berdasarkan data yang di peroleh dari BPS laporan usaha yang diukur dalam perhitungan GDP adalah:

1. Pertanian, kehutanan dan perikanan
2. Pertambangan dan pengendalian
3. Industri pengolahan
4. Pengadaan listrik dan gas
5. Pengadaan air, pengolaan sampah, limbah dan daur ulang.
6. Kontruksi
7. Perdagangan besar
8. Transportasi dan pergudangan
9. Penyediaan akomodasi dan makan
10. Informasi dan komunikasi
11. Jasa keungn dan asuransi
12. Real estate
13. Jasa perusahaan
14. Admistrasi
15. Jasa pendidikan
16. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
17. Jasa lainnya

Ketahanan Pangan (*food security*) adalah paradox dan lebih merupakan penemuan dunia modern. Secara prosentase, lebih banyak produsen pangan di masa lalu ketimbang masa kini; tetapi dunia hari ini lebih aman pangan ketimbang masa lalu. Paradoks ini bisa terlihat jelas di banyak Negara maju, salah satunya adalah Inggris Raya; Prosentase populasi pertanian di UK tahun 1950 adalah 6 % dan terus menurun secara drastis hingga 2 % di tahun 2000, dan berdasarkan prediksi FAO (*Food and Agriculture Organisation*), jumlah populasi pertanian di

Inggris akan terus turun menjadi 1% di tahun 2010. Sederhananya, sekitar 896,000 petani akan memberi makan sedikitnya 60 juta penduduk. Indonesia saat ini memiliki 90 juta petani (seratus kali dari Inggris) atau sekitar 45% penduduk memberimakan seluruh penduduk (sekitar 230 juta orang). Tetapi fakta-fakta dari Nusa Tenggara Barat (yang kerap dikenal sebagai daerah lumbung padi) serta daerah semi arid seperti Nusa Tenggara Timur di semester pertama tahun 2005, justru menghadapi ketahanan pangan yang rapuh, terbukti dengan tingginya tingkat kekurangan pangan dan gizi buruk. (Lassa, 2005)

2.2.2 Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan Dari sejarah, istilah ketahanan pangan (*food security*) mulai mengemuka saat terjadi krisis pangan dan kelaparan yang menimpa dunia pada 1971. Sebagai kebijakan pangan dunia, istilah ketahanan pertama kali digunakan oleh PBB untuk membebaskan dunia, terutama negara-negara sedang berkembang dari krisis produksi dan suplai makanan pokok. Fokus ketahanan pangan pada masa itu, sesuai dengan definisi PBB adalah menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan pokok dan membebaskan dunia dari krisis pangan. Definisi tersebut kemudian disempurnakan pada *International Conference of Nutrition* pada 1992 yang disepakati oleh pimpinan negara anggota PBB, yakni tersedianya pangan yang memenuhi kebutuhan setiap orang, baik dalam jumlah maupun mutu pada setiap individu untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Maknanya adalah tiap orang setiap saat memiliki akses secara fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup agar hidup sehat dan produktif (Hakim 2014).

World Food Summit pada tahun 1996 mendefinisikan ketahanan pangan terjadi apabila semua orang secara terus menerus, baik secara fisik, sosial,

dan ekonomi mempunyai akses untuk pangan yang memadai/cukup, bergizi dan aman, yang memenuhi kebutuhan pangan mereka dan pilihan makanan untuk hidup aktif dan sehat (Safa'at, S 2013).

Beberapa ahli sepakat bahwa ketahanan pangan minimal mengandung dua unsur pokok, yaitu ketersediaan pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan tersebut. Ketersediaan dan kecukupan pangan mencakup kuantitas dan kualitas bahan pangan agar setiap individu dapat terpenuhi standar kebutuhan kalori dan energi untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Penyediaan pangan dapat ditempuh melalui produksi sendiri dan impor dari negara lain. Komponen kedua yaitu aksesibilitas setiap individu terhadap bahan pangan dapat dijaga dan ditingkatkan melalui pemberdayaan sistem pasar serta mekanisme pemasaran yang efektif dan efisien, yang dapat disempurnakan melalui kebijakan niaga, atau distribusi bahan pangan dari sentra produksi sampai ke tangan konsumen (Arifin 2001).

Di Indonesia konsep ketahanan pangan dituangkan dalam Undang-undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan. Dalam definisi tersebut ditegaskan lima bagian dalam konsep tentang ketahanan pangan tersebut, yaitu:

- a. Terpenuhinya pangan yang cukup dari segi jumlah aspek ketersediaan, yaitu bahwasanya pangan ada dan jumlahnya mencukupi bagi masyarakat, baik yang bersifat nabati maupun hewani.
- b. Terpenuhinya mutu pangan (aspek kesehatan/ healthy), yaitu bahwasanya pangan yang ada atau diadakan memenuhi standar mutu yang baik dan layak untuk dikonsumsi manusia. Kaitannya dalam pemenuhan kebutuhan gizi mencukupi kebutuhan akan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. 7

- c. Aman (aspek kesehatan/ healthy), yaitu bahwasanya pangan yang dikonsumsi memenuhi standar kesehatan bagi tubuh dan tidak mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan manusia.
- d. Merata (aspek distribusi/distribution), yaitu bahwasanya pangan terjamin untuk distribusi secara merata ke setiap daerah sehingga pangan mudah diperoleh masyarakat.
- e. Terjangkau (aspek akses), yaitu bahwasanya pangan memungkinkan untuk diperoleh masyarakat dengan mudah dan harga wajar. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization, WHO)

mengemukakan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, aksesibilitas pangan, dan pemanfaatan pangan (utilitas). Ketersediaan pangan menyangkut kemampuan individu memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasarnya. Sementara itu, aksesibilitas pangan berkaitan dengan cara seseorang mendapatkan bahan pangan. Sedangkan utilitas pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan berkualitas (Hakim 2014). Ketahanan pangan didefinisikan sebagai: “Ketahanan pangan terjadi apabila semua orang secara terus menerus, baik secara fisik, sosial, dan ekonomi mempunyai akses untuk pangan yang memadai/cukup, bergizi dan aman, yang memenuhi kebutuhan pangan mereka dan pilihan untuk hidup aktif dan sehat”. Pemerintah Indonesia melalui Dewan Ketahanan Pangan bekerja sama dengan World Food Programme (WFP) membuat Food Insecurity Atlas (FIA) tingkat kabupaten. Pertama diluncurkan Food Insecurity Atlas pada tahun 2005, lalu diperbaharui lagi dengan membuat Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)

8 tahun 2009 yang dibuat berdasarkan pendekatan: ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan

Definisi dan paradigma ketahanan pangan terus mengalami perkembangan sejak adanya Conference of Food and Agriculture tahun 1943 yang mencanangkan konsep *secure, adequate and suitable supply of food for everyone*". Definisi ketahanan pangan sangat bervariasi, namun umumnya mengacu definisi dari Bank Dunia (1986) dan Maxwell dan Frankenberger (1992) yakni "akses semua orang setiap saat pada pangan yang cukup untuk hidup sehat (*secure access at all times to sufficient food for a healthy life*). Studi pustaka yang dilakukan oleh IFPRI (1999) diperkirakan terdapat 200 definisi dan 450 indikator tentang ketahanan pangan (Weingärtner, 2000). Berikut disajikan beberapa definisi ketahanan yang sering diacu :

1. Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996: kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
2. USAID (1992: kondisi ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses secara fisik dan ekonomi untuk memperoleh kebutuhan konsumsinya untuk hidup sehat dan produktif.
3. FAO (1997) : situasi dimana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dimana rumah tangga tidak beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut.

4. FIVIMS 2005: kondisi ketika semua orang pada segala waktu secara fisik, social dan ekonomi memiliki akses pada pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dan sesuai dengan selernya (food preferences) demi kehidupan yang aktif dan sehat.
5. Mercy Corps (2007) : keadaan ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap terhadap kecukupan

pangan, aman dan bergizi untuk kebutuhan gizi sesuai dengan selernya untuk hidup produktif dan sehat.

6. Ketahanan pangan adalah akses oleh semua orang pada segala waktu atas pangan yang cukup untuk kehidupan yang sehat dan aktif. Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketahanan pangan memiliki 5 unsur yang harus dipenuhi :

- a. Berorientasi pada rumah tangga dan individu.
- b. Dimensi waktu setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses.
- c. Menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik fisik, ekonomi dan social.
- d. Berorientasi pada pemenuhan gizi.
- e. Ditujukan untuk hidup sehat dan produktif. Di Indonesia sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1996, pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari: tersedianya pangan secara cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Dengan pengertian tersebut, mewujudkan ketahanan pangan dapat lebih dipahami sebagai berikut:

1. Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, diartikan ketersediaan pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya, yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia.
2. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta aman dari kaidah agama.
3. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, diartikan pangan yang harus tersedia setiap saat dan merata di seluruh tanah air.
4. Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, diartikan pangan mudah diperoleh rumah tangga dengan harga yang terjangkau.

2.2.3 Teori Produksi

Penggunaan faktor produksi berlaku *the law of diminishing return (LDR)* yaitu sebuah hukum dalam ekonomi yang menjelaskan tentang proporsi input yang tepat untuk mendapatkan output yang maksimal (Manurung, 2008). Sebuah perusahaan dapat merubah input menjadi output dengan berbagai cara, dengan menggunakan berbagai kombinasi tenaga kerja, bahan mentah dan modal. Kita dapat menjabarkan hubungan antara input ini dalam proses produksi dan output yang dihasilkan melalui suatu fungsi produksi mengindikasikan output tertinggi yang dapat diproduksi oleh perusahaan atas setiap kombinasi spesifik dari input (Pindyck, 2003).

Usaha pertanian, seorang pengusaha atau seorang petani akan selalu berfikir bagai mana ia mengalokasikan inputseefesien mungkin untuk dapat memperoleh produksi yang maksimal. Cara pemikiran yang demikian adalah wajar mengingat petani melakukan konsep bagai mana memaksimal kan keuntungan. Dalam ilmu ekonomi cara berfikir demikian di sebut dengan pendekatan memaksimum kan keuntungan pada keterbatasan biaya dalam melaksanakan usaha tani, maka mereka tetap mencoba bagaimana meningkat kan keuntungan tersebut dengan kendala biaya usaha tani yang terbatas. Suatu tindakan yang di lakukan adalah bagaimana memperolehkeuntungan yang lebih besar dengan menekan biaya produksi sekecil-kecilnya. Pendekatan ini di kenal dengan istilah meminimkan biaya atau *cost minization*. (Sokartiw 2003)

Prinsip pendekatan tersebut *minization* adalah sama saja, yaitu bagai mana memaksimumkan ke untungan yang diterima petani atau seorang pengusaha pertanian. Kedua pendekatan tersebut dapat di katakan pendekatan serupa tapi tidak sama. Ketidak samaan ini tentu di lihat dari segi sifat atau petani yang bersangkutan, petani besar atau pengusaha besar selalu berprinsip bagai mana meleakukan keuntungan sebesar-besar nya. Melaluipendekatan profit *maximization*karena mereka tidak di harapkan dengan keterbatasan pembiayaan. Sebalik nya untuk petani kecil atau petani subsiten sering bertindak sebalik nya, yaitu bagaimana memperoleh keuntungan dengan keterbatasan yang mereka miliki.

Untuk memahami kedua konsep tersebut, konsep hubungan antara output harus dipahami. Hubungan antara output dengan input disebut dengan fungsi produksi. Produsen adalah mereka yang melakukan produksi. Sedangkan

konsumen adalah mereka yang melakukan konsumsi. Masalah ekonomi timbul karena tidak seimbang antara kebutuhan manusia, apabila di bandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Kebutuhan manusia dapat di katakan tidak terbatas jumlahnya, karena manusia tidak pernah merasa puas, kebutuhan yang satu terpenuhi muncul kebutuhan lainnya, begitu juga seterusnya. Sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia sangat terbatas jumlah jika dibandingkan dengan jumlah kebutuhan manusia".(josonhardjono(2003)

Produksi yaitu proses kombinasi dan koordinasi material-material dan kekuatan-kekuatan (input, faktor, sumber daya, jasa jasa produksi) dalam pembatalan suatu barang atau jasa (output atau produk)". (josohardjono 2007)

Produksi adalah sebagai usaha manusia untuk menciptakan atau menambah daya atau nilai guna dari suatu barang atau benda untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia baik secara individu maupun secara bersama-sama menghadapi masalah ekonomi: (Rosyidi 2005)

2.2. Fungsi produksi

Fungsi produksi adalah sebuah deskripsi matematis atau kuantitatif dan berbagai macam kemungkinan-kemungkinan produksi teknis yang di hadapi suatu produsen. (josohaardjono 2003)

Suatu produsen dalam melakukan proses produksi untuk mencapai tujuannya harus menentukan dua macam keputusan, yaitu:

1. Berapa output yang harus di produksikan
2. Berapa dan dalam kombinasi bagai mana faktor-faktor produksi (input) di pergunakan

Dalam teori ekonomi, setiap proses produksi mempunyai landasan teknis yang di sebut fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan fisik atau teknis antara jumlah produk yang di hasil kan persatuan waktu, tanpa memperhatikan harga-harga, baik harga produksi maupun produk. secara matematis fungsi produksi tersebut dapat di nyatakan sebagai berikut;

$$Y=f(X_1,X_2,X_3, \dots X_n)$$

Dimana:

Y= tingkat produksi yang di hasilakan

X= berbagai faktor produksi (input)

Fungsi ini masih bersifat umum, hanya bisa menjelaskan bahwa produksi yang dihasilkan tergantung dari faktor-faktor produksi yang diperlukan, akan tetapi belum bisa memberikan penjelasan kuantitatif mengenai hubungan antara produk dan faktor-faktor produksi tersebut. Untuk dapat memberikan penjelasan kuantitatif t, fungsi produksi tersebut harus dinyatakan dalam bentuk spesifik, sebagai berikut.

1. $Y= a + bX$ (fungsi linier)
2. $Y= a + bX - cX^2$ (fungsi kuadratis)
3. $Y= aX_1, X_2, X_3$ (fungsi cobb-douglas) dan lain lain

Dalam teori ekonomi , sifat fungsi produksi diasumsikan tunduk pada suatu hukum yang di sebut *The law diminishing return* (hukum kenaikan hasil berkurang). Hukum ini di nyatakan bahwa apabila penggunaan suatu barang input di tambah sedang inpu-input yeng lain tetap, maka tambahan output yang

dihasilkan dari setiap tambahan suatu unit input yang di tambah kan tadi mulanya naik, kemudian seterusnya menurun jika input tersebut terus bertambah.

Suatu persamaan yang menunjukkan hubungan ketergantungan (fungsional) antara tingkat input yang di gunakan dalam proses produksi dengan tingkat output yang dihasilkan.

Fungsi produksi secara matematis:

$$Q = F (K,L,R,T)$$

Dimana:

Q = jumlah output (hasil)

K = modal (kapital)

L = tenaga kerja (labour)

R = kekayaan (raw material)

T = teknologi

2.2.1 Faktor-faktor produksi

Untuk melakukan produksi memerlukan sumber-sumber daya yang dapat menunjang dilaksanakannya produksi. Di antaranya tanah, tenaga kerja, modal, kecakapan tata laksana.

1. Tanah

Tanah yang dimaksud adalah segala sesuatu yang bisa menjadi faktor produksi dan berasal atau tersedia dalam ini tanpa usaha manusia, yang meliputi:

- a. Tenaga pertumbuhan yang ada dalam tanah, baik untuk pertanian, peternakan, perikanan, maupun pertambangan.
- b. Tenaga air untuk pengairan, pengaraman, maupun pelayaran.

- c. Ikan dan mineral baik ikan dan mineral darat (sungai, danau, tambak, kuala, dan sebagainya).
- d. Tanah yang di atas nya didirikan bangunan
- e. *Living stock*, sepertiternak dan binatang lain yang bukan ternak.
- f. Dan lain nya sperti batuan, dan kayu-kayuan.

Tanah (*land*) maupun sumber daya alam (*nature resources*) ada disini adalah segala sumber asli yang tidak berasal dari kegiatan manusia, dan tidak bisa diperjual belikan

2. Tenaga kerja

Dalam ilmu ekonomi, yang di maksud dengan istilah tenaga kerja manusia (*labour*) bukan semata mata kekuatan manusia untuk mencangkul, mengergaji, bertukang dan segala kegiatan fisik lainnya. Hal yang dimaksud disini adalah sumber daya manusia (*human resources*)

Dalam istilah sumber daya manusia ini tercakup kemampuan mental atau kemampua nonfisik lainnya, tidak saja ternaga terdidik atau juga tenaga yang tidak terdidik, tidak hanya tenaga terampilan tetapi tenaga yang tidak terampil

3. Modal

Yang dimaksud dengan modal atau capital dalam faktor produksi ketiga adalah barang modal riil. Pembuatan alat atau barang modal untuk yang di gunakn untuk membantu pembuatan barang konsumsi atara lain. Mesin-mesin dan peralatan, bahan mentah, bahan bakar, bangunan pabrik, alat pengakut dan lain lain

4. Kecepatan tata laksana

Yang dimaksud dengan kecepatan tata laksana ini adalah seorang entrepreneur. Seorang entrepreneur harus mampu mengorganisasi ketiga faktor lainnya agar tercapai hasil yang terbaik, ia pun menanggung resiko setiap bangun jatuah usahanya.

Keempat faktor yang di sebutkan di atas, adalah unsur unsur yang harus berkerja demi terlaksananya proses produksi yang baik

2.2.3 Mekanisme produksi

Mekanisme produksi pertanian adalah bagian barang atau komoditi pertanian bergerak dari produsen ke konsumen. Untuk itu perlu ada nya pembahasan yang mencakup aspek permintaan dan penawaran, karena pemerintah dan penawaran ditentukan atau juga menentukan harga dan elastisitas, yaitu elastisitas permintaan, penawaran, dan harga. Begitu juga halnya, karena besar kecilnya permintaan serta besarnya harga dan elastisitas yang dipengaruhi oleh adanya pasar.

1. Permintaan

Permintaan suatu komoditi pertanian adalah banyak nya komoditi pertanian yang dibutuhkan yang diberikan oleh konsumen. Korna itu besar kecil nya komoditi pertanian umum nya di pengaruhi oleh harga, harga substitusi atau harga komplemnya, selera dan keinginannya, jumlah konsumen dan pendapatan konsumen yangbersangkutan.

Dilain pihak, Winardi (2006) menyatakan bahwa pengertian permintaan adalah jumlah barang yang sanggup dibeli oleh para pembeli pada tempat dan waktu tertentu dengan harga yang berarti saat ini.

Permintaan digunakan untuk mengetahui jumlah barang yang dibeli oleh konsumen dengan harga alternatif untuk membeli barang yang bersangkutan dengan anggapan bahwa harga barang tetap. Hal ini dapat dijelaskan dengan serta permintaan, yaitu kurva yang menunjukkan hubungan antara jumlah maksimum dari barang yang dibeli dari konsumen. Dengan alternatif pada waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi adalah jumlah penduduk, pendapatan, harga barang, harga barang lainnya, dan frekuensi konsumen. Karena jumlah penduduk dan penyebaran pendapatan berpengaruh terhadap permintaan barang dipasaran. Maka fungsi permintaan juga dipengaruhi variabel ini.

Untuk barang normal pada harga yang sama, bertambahnya pendapatan konsumen dan merentannya pendapatan berarti juga menambah permintaan. Dengan demikian kurva permintaan barang yang arahnya negatif ini akan bergeser ke kanan. *Ceteris paribus*. Sebaliknya untuk barang tuna nilai (*inferior*), bertambahnya pendapatan justru mengakibatkan kurangnya permintaan. Ini berarti bahwa dengan naiknya pendapatan, kurva permintaan akan bergeser ke kiri. *Ceteris paribus*. Sedangkan pada barang netral, bertambah atau berkurangnya pendapatan tidak akan mempengaruhi fungsi permintaan.

Arah kurva permintaan negatif ini, dipengaruhi oleh angka elastisitas. Berubahnya permintaan yang disebabkan karena perubahan pendapatan dinyatakan dengan elastisitas pendapatan dari permintaan, sedangkan perubahan permintaan yang disebabkan karena berubahnya harga dari permintaan. Begitu pula halnya dengan perubahan permintaan terhadap barang X yang disebabkan oleh berubahnya harga barang Y. Bila barang X dan Y mempunyai yang erat, maka perubahan terhadap barang X, hingga dapat disebabkan karena terjadinya

perubahan harga barang Y. Keadaan seperti ini sering dinyatakan dengan elastisitas silang, yaitu perbandingan persentase perubahan permintaan barang X terhadap persentase perubahan harga barang Y. Bila angka elastisitas silang bertanda positif, berarti hubungan kedua barang tersebut bersifat substitusi dan sebaliknya bila bertanda negatif berarti hubungan kedua barang tersebut bersifat komplementer.

Jumlah penduduk yang semakin bertambah juga akan bergeser kurva permintaan ke kanan, yang berarti bahwa pada harga yang sama jumlah barang yang diminta semakin besar, *ceteris paribus*. Tetapi untuk permintaan perkapita, kurva permintaan dapat bergerak ke kanan atau ke kiri dan bahkan tidak bergeser sama sekali.

Disamping itu, kurva permintaan untuk barang normal juga akan bergeser dari tempat asalnya bila terjadi perubahan pada barang lain yang erat hubungannya dengan barang yang dikonsumsi, selera dan preferensi. Jika ada suatu barang X dan Y, maka dapat saling menggantikan (substitusi), maka kenaikan barang X dapat menyebabkan bergesernya kurva permintaan barang Y ke kanan. Hal ini penggunaan barang X yang harganya lebih mahal dapat digantikan dengan barang Y yang harganya lebih murah, *ceteris paribus*. Sebaliknya jika sifat barangnya saling melengkapi (komplementer) maka dengan kenaikan barang X akan mengakibatkan bergeser kurva permintaan barang Y ke kiri. Ini berarti permintaan terhadap kedua barang tersebut berkurang, *ceteris paribus*. Faktor selera dan preferensi, sulit digambarkan pada kurva permintaan, karena variabel ini tidak dapat dikuantifikasikan. Secara konseptual, dengan lebih disukainya barang tersebut, kurva permintaan akan bergeser ke kanan.

Dalam barang normal seperti beras, kedelai, pakaian dan lain-lain, selalu mengikuti kaedah permintaan atau hukum permintaan yang menyebabkan bahwa makin tinggi harga komoditi tersebut makin besar jumlah permintaan, namun demikian, untuk barang tertentu yang sifat netral, misalnya garam, tinggi dan rendah nya harga tidak akan mempengaruhi besar kecilnya permintaan. Sebab walaupun harga garam turun, orang tidak akan menambah konsumsi garam dalam kebutuhan keluarga konsumen tersebut.

2. Penawaran

Faktor yang berkaitan dengan aspek penawaran antara lain adalah penawaran individu agregat, kurva penawaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan penawaran.

a. Penawaran individu dan agregat

Penawaran individu adalah penawaran yang disediakan individu produsen, di peroleh dari produksi yang di hasilakan. Sedangkan penawaran agregat merupakan perjumlahan dari penawaran individu.

b. Kurva penawaran

Untuk jenis barang yang normal, maka dengan semakin tinggi nya barang yang di tawarkan (Q), akan menyebabkan harga (P) yang semakin menurun. Maka:

$$P = F(Q)$$

Dengan adanya perubahan Q yang di sebabkan karena perubahan P, maka hal ini akan bergeser kurva penawaran kearah sebelah kanan atau sebelah kiri. Bila perubahan Q yang menyebabkan P menurun, maka perubahan kurva penawaran akan bergerak ke kanan [$P_1 = F(Q_1)$]. Sebaliknya kalau perubahan Q

akan menyebabkan P semakin tinggi, maka kurva penawaran akan bergeser ke kiri [$P_2 = F(Q_1)$]. Berdasarkan asumsi bahwa variabel lain yang mempengaruhi P (selain Q) di anggap tetap.

c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Penawaran

Beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan adanya penawaran sebagai berikut:

a) Teknologi

Adanya teknologi, misalnya penggunaan teknologi baru sebagai penggunaan teknologi lama, maka produksi akan semakin meningkat.

b) Harga Input

Besar kecilnya input juga akan mempengaruhi besar kecilnya jumlah input yang terpakai. Bila harga faktor produksi (input) turun, maka petani cenderung akan membelinya pada jumlah yang relatif besar.

c) Harga Produksi Lain

Yang dimaksud dengan harga produksi yang lain adalah adanya perubahan harga produksi yang lain adalah adanya perubahan harga produksi alternatif, perubahan harga alternatif akan menyebabkan terjadinya produksi yang semakin meningkat atau sebaliknya semakin menurun.

d) Jumlah Produsen

Karena adanya ransangan untuk komunitas pertanian tertentu, maka petani cenderung mengusahakan tanaman tersebut.

e) Harapan Produsen Terhadap Harga Produksi Dimasa Mendatang

Seringkali ditemukan suatu peristiwa petani meramal besaran harga di masa mendatang, apakah suatu komoditi menaik atau menurun pada waktu tertentu.

f) Elastisitas Produksi

Waktu yang diperlukan untuk melakukan penyesuaian produksi sebagai akibat adanya ransangan harga, adalah memerlukan waktu. Hal ini disebabkan bukan karna faktor ekonomis seperti tersedianya biaya produksi, tetapi juga disebabkan karna adanya penyesuaian perubahan faktor biologi dan ekologi anaman dari semula yang diusahakan tidak intensif menjadi intensif.

2.2.4 Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional

UU No.18 tahun 2012 tentang pangan, mengamanatkan agar upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan diutamakan dari produksi dalam negeri. Upaya mengisyaratkan agar dalam menetapkan ketahanan pangan harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan secara terintegrasi. Yang telah di jabarkan dalam PP No. 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi.

Sejarah dengan undang- undang pangan tersebut, pemerintah dibawah kepemimpinan presiden Joko Widodo dan wapres Jusuf Kalla menempatkan pangan sebagai salah satu agenda penting pembangunan nasional. Hal ini tertuang dalam RPJMN (Rencana pembangunan jangka menengah nasional) 2015-2019 bahwa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik adalah melalui meningkatkan kedaulatan pangan.

Kedaulatan pangan memberikan dukungan kekuatan dalam menuntukan kebijakan pangan secara mandiri yang diarahkan untuk menyediakan beraneka ragam pangan dari produksi dalam negeri sesuai potensi dalam negeri sesuai potensi sumberdaya yang kita miliki. Ketersediaan yang beraneka ragam akan mempercepat keragaman konsumsi pangan sebagai yang di amatkan dalam PP 22/2009 tentang kebijakan percepatan keragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, dan pementan 43/2009 tentang gerakan percepatan keragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, serta 27 peraturan/surat edaran gubernur di 27 provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian, dapat segera di wujudkan manusia indonesia yang sehat, aktif dan produktif.

2.3 Arah Kebijakan dan strategi Nasional

Agenda ketujuh pembangunan nasional dalam RPJMN (Rencana pembangunan jangka menengah nasional) 2015-2019 yang alam merupakan penjabaran dari visi dan program aksi (Nawacita) pemerintah joko widodo dan jusuf kalla adalah mewujudkan kemnadirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis domestik salah satu cara untuk mencapai agenda pembangunan tersebut adalah melalui peningkatan kedaulatan pangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ketahanan pangan dalam lima tahun kedepan dan kemandirian pangan arahkebijakan umum kedaulatan pangan RPJMN (Rencana pembangunan jangka menengah nasional) 2015-2019 adalah pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjajminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Saran utama prioritas bidang pangan pertanian periode 2015-2019 adalah:

1. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari dalam negeri
2. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga.
3. Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor pola pangan harapan (PPH) sebesar 92,5 (tahun 2019).

Strategi yang akan dilakukan meliputi:

1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri, yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, daging, gula, cabai dan bawang merah.
2. Peningkatan kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan.
3. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat.
4. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan terutama mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan serangan organisme pengganggu tanaman dan penyakit hewan.
5. Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan.

2.3.1 Strategi badan pertahanan pangan

Arah kebijakan penetapan ketahanan pangan tersebut dilakukan dengan lima strategi utama, meliputi:

1. memprioritaskan pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan pendesaan untuk:
 - a. meningkatkan kapasitas produksi pangan domestik.
 - b. Menyediakan lapangan kerja.
 - c. Meningkatkan pendapatan masyarakat
2. Pemenuhan pangan bagi kelompok masyarakat terutama masyarakat miskin kronis dan transien (akibat bencana alam, sosial dan ekonomi) melalui pendistribusian bantuan pangan.
3. Pemberdayaan masyarakat supaya mampu memanfaatkan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal.
4. Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumber daya lokal.
5. Penanganan keamanan pangan segar.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Estimasi	Variabel	Hasil Penelitian
Teguh Supriyanto	Analisis tingkat ketahanan rumah tangga tani desa	Maximum Likelihood (MLE)	Pendapatan, Pendidikan, Kepala Keluarga	pendapatan, pendidikan kepala keluarga, kemampuan memenuhi kebutuhan keuangan berpengaruh terhadap tingkat ketahanan pangan dengan tingkat siknipikasi 10 %
Lien Darmawati	Faktor yang mempengaruhi tingkat ketahanan	Analisis regresi	Gizi, kesehatan, kerentanan ketahanan	Variabel gizi dan kesehatan memiliki kolerasi negatif dengan

	pangan desa		pangan	variabel kerentanan ketahanan pangan dengan nilai kolerasi 0,383
Sherly	Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga di Aceh Barat Daya	Metode kuantitatif	Pekerjaan, pendidikan dan pendapatan	Secara simultan (bersama-sama) pekerjaan, pendidikan dan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketahanan pangan pada Aceh Barat Daya

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, Situasi, Variabel yang timbul dimasyarakat. Penelitian Kuantitatif biasanya diterapkan untuk penyelidikan permasalahan sosial berdasarkan pada sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel yang diukur dengan angka dan dianalisa dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar.

3.2 Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan Variabel yang di gunakan untuk memuat suatu sifat sehingga dapat digunakan untuk penelitian.

1. Strategi ketahanan pangan dalam mendukung perkembangan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Strategi ketahanan pangan dalam mendukung variable pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat Daya

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Barat Daya

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian selama 3 bulan yaitu Januari 2018 sampai dengan Maret 2018

3.4 Jenis dan Sumber Data

Menggunakan data sekunder yang di peroleh langsung dari publikasi resmi yang berasal dari BPS Kabupaten Aceh Barat Daya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di gunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi untuk menghimpun data sekunder yang di publikasikan dari website resmi dan Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Barat Daya

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Data yang diperoleh akan di klasifikasikan dan diolah sesuai dengan analisis yang dipakai.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Barat Daya

Keberadaan Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai sebuah Kabupaten merupakan hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Aceh Selatan sebagai Kabupaten induk pada saat itu. Sebelumnya Aceh Selatan juga sudah dimekarkan dengan lahirnya Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 1999. Pengakuan pemerintah terhadap lahirnya Kabupaten Aceh Barat Daya secara Yuridis dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2002. Penggunaan istilah Aceh Bara Daya pada masa kemerdekaan Indonesia baru muncul pada tanggal 10 November 1965. Penggunaan istilah Aceh Barat Daya di ditandai dengan terbentuknya panitia penuntut daerah tingkat II bagi Aceh Barat Daya.

Proses terbentuknya Kabupaten Aceh Barat Daya ini berlangsung selama 20 tahun. Dalam jangka waktu 20 tahun, banyak peristiwa dan upaya yang dilalui oleh panitia penuntut daerah untuk terwujudnya Kabupaten Aceh Barat Daya. Salah satu upaya Pemerintah pusat untuk dapat memisahkan Aceh Barat Daya dari Kabupaten Aceh Selatan. Permohonan tersebut tidak langsung dipenuhi oleh pemerintah pusat. Sehingga Pemerintah daerah tersebut harus berulang kali mengajukan permohonannya supaya dapat diterima. Alasan Aceh Barat Daya ingin memisahkan diri dari Kabupaten induk Aceh Selatan ialah karena wilayah Kabupaten Aceh Selatan sangat luas, sehingga pembangunan sudah tidak terjangkau secara merata. Jika dilihat dari hak otonomi daerah, Aceh Barat Daya

sudah dapat berdiri menjadi Kabupaten baru. Kabupaten Aceh Barat Daya membentuk beberapa organisasi untuk mengajukan permohonan pemisahan dari Kabupaten Aceh Selatan dan membentuk Kabupaten sendiri .

Sejak zaman kerajaan Aceh, pantai barat daya sudah berkembang dalam berbagai aktivitas. Teluk Susoh (salah satu nama Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya) pada abad ke-18 dan awal abad ke-19, merupakan salah satu pusat perdagangan di pantai barat Aceh dengan pusat pelabuhan di Kedai Susoh. Aceh Barat Daya, sejak dulu dikenal sebagai kota perdagangan di daerah barat selatan Aceh. Penduduk-penduduk yang ada di Susoh, kemudian menyebar ke berbagai daerah melalui perdagangan. Perkembangan yang semakin pesat ini, membuat pemerintah dapat mempercayai Aceh Barat Daya mampu berdiri sendiri menjadi sebuah Kabupaten. Sehingga pada akhirnya, Departemen Dalam Negeri menyetujui usulan pemekaran yang kemudian diajukan ke pemerintah DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia). Melalui proses pembahasan di DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) yang juga memakan waktu yang panjang, maka pada

4.2 Kondisi Demografis Kabupaten Aceh Barat Daya

Kabupaten atau Kota yang berada dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh berjumlah 23 Kabupaten/Kota. Salah satu Kabupaten tersebut ialah Kabupaten Aceh Barat Daya. Letak geografis Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dikatakan sangat strategis jika dibandingkan dengan Kabupaten yang lain. Hal itu dikarenakan Kabupaten Aceh Barat Daya terletak di bagian Barat Provinsi Aceh, yang menghubungkan lintasan koridor barat dan berbatasan langsung dengan laut lepas (Samudera Hindia), yang menjadi hilir dari sungai-sungai besar untuk

mengalir ke laut lepas. Kabupaten Aceh Barat Daya juga mempunyai topografi yang tidak stabil atau berubah-ubah mulai dari pantai hingga gunung dan perbukitan yang bergelombang.

Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya secara geografis terletak di bagian Barat Selatan di Provinsi Aceh. Kabupaten aceh barat daya terletak pada 3°34'24" – 4° 05'37" lintang utara dan 96°34' 57"-97° 09' 19" Bujur timur dengan ibukota Blangpidie sampai dengan tahun 2013 kabupaten aceh barat daya di bagi 9 Kecamatan, 23 mukim, dan 152 Desa atau Gampong. Batas-batas wilayah kabupaten aceh barat daya sebelah utara dengan kabupaten gayo Lues, sebelah Timur dengan Kabupaten Aceh Selatan, sebelah Selatan dengan Samudra Hindia, dan Sebelah Barat Dengan kabupaten Nagan Raya.

Luas kabupaten aceh barat daya 1.88,05 Km², dengan hutan mempunya lahan terluas yaitu 129.291,10 Ha, di ikuti lahan perkebunan seluas 27.504,28 Ha. Sedang kan lahan Bandar udara kuala batu mempunya lahan yang terkecil yaitu 42,95 Ha.

3. Administrasi

Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Aceh Barat Daya terbagi menjadi 9 Kecamatan, 20 Pemukiman dan 152 Desa, yang terdiri dari 132 Desa definitif dan 20 Desa persiapan. Menurut hitungan GIS (Geographics Information System) luas Kabupaten Aceh Barat Daya mencakup 1.882,05 Km² atau 188.205,05 Ha. Kecamatan Blang Pidie sebagai Kota Aceh Barat Daya memiliki luas 581,22 Km², kemudian disusul oleh Kecamatan Babahrot dengan luas 528,28 Km². Sedangkan Kecamatan yang tidak begitu luas adalah Kecamatan Susoh dengan luas 19,05 Km² atau sekitar 1,01% dari luas

total Kabupaten Aceh Barat Daya. Adapun jarak Kecamatan terjauh dari Kecamatan Blang pidie yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Aceh Barat Daya, adalah Kecamatan Babahrot dengan panjang jarak sekitar 32 Km, kemudian disusul oleh Kecamatan Lembah Sabil dengan jarak sepanjang 26 Km, dan selanjutnya Kecamatan Manggeng dengan panjang 22 Km.

Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki letak posisi Kecamatan yang sangat teratur. Jika perjalanan di mulai dari Kabupaten Nagan Raya, maka ketika memasuki Kabupaten Aceh Barat Daya pertama sekali akan sampai ke Kecamatan Babahrot, kemudian Kuala Batee, disusul Kecamatan Jeumpa, selanjutnya Kecamatan Susoh, Kecamatan Blang Pidie, Kecamatan Setia, Kecamatan Tangan-tangan, Kecamatan Manggeng, dan terakhir Kecamatan Lembah Sabil. Selanjutnya memasuki wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Namun, Kecamatan-kecamatan yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat Daya, dapat dikatakan berada dalam posisi yang luas sehingga memerlukan perjalanan yang panjang untuk tiba di kecamatan selanjutnya. Untuk lebih jelas dan lengkap mengenai Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya, bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Nama, Luas Wilayah per Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah (Ha)
1	Babahrot	14	52.828,06
2	Kuala Batee	21	31.482,42
3	Jeumpa	12	22.928,69
4	Susoh	29	1.905,35
5	Blangpidie	20	58.122,21
6	Setia	9	4.120,27
7	TanganTangan	12	6.322,92
8	Manggeng	18	5.551,86
9	LembahSabil	14	4.943,19
Jumlah Total		152	188.205,02

4. Kondisi Fisik

Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki iklim tropis dengan curah hujan 3.785,5 mm/tahun. Musim kemarau muncul berkisar antara bulan Januari hingga Agustus, sedangkan musim hujan biasanya berada pada bulan September hingga Desember. Namun, pada musim kemarau juga sering terjadi hujan, penyimpangan ini dikarenakan curah hujan yang begitu tinggi seperti tersebut di atas. Selama bulan kering atau kemarau, tidak pernah terjadi curah hujan kurang dari 100 mm. Sedangkan pada bulan basah, curah hujan bisa mencapai lebih dari 200 mm selama 9,5 bulan. Dengan posisi Kabupaten dan keadaan alam yang sedemikian rupa tersebut, dipengaruhi oleh iklim yang terjadi di wilayah ini. Keadaan iklim di wilayah ini cenderung basah dikarenakan curah hujan yang turun di sepanjang tahun. Curah hujan terbesar terjadi pada bulan Desember, dengan perbedaan temperatur 5-7 oC antara siang dan malam. Iklim sangat mempengaruhi banyaknya curah hujan, selain itu juga pengaruh kondisi geografis dan perputaran arus udara. Akibatnya, pencatatan jumlah curah hujan terdapat perbedaan di antara semua stasiun pengamatan.

4.3. perkembangan produksi padi dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Barat Daya

Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Ibu Kota Blang Pidie merupakan sebuah kota dagang yang dikenal sejak dulu. Pusat perbelanjaan Barat Selatan Aceh terdapat di Kota Blang Pidie. Tidak heran, banyak pendatang yang datang untuk mencari nafkah dengan berdagang di Kota ini, selain itu juga banyak pendatang untuk sekedar berbelanja di Kota Blang Pidie. Selain perdagangan,

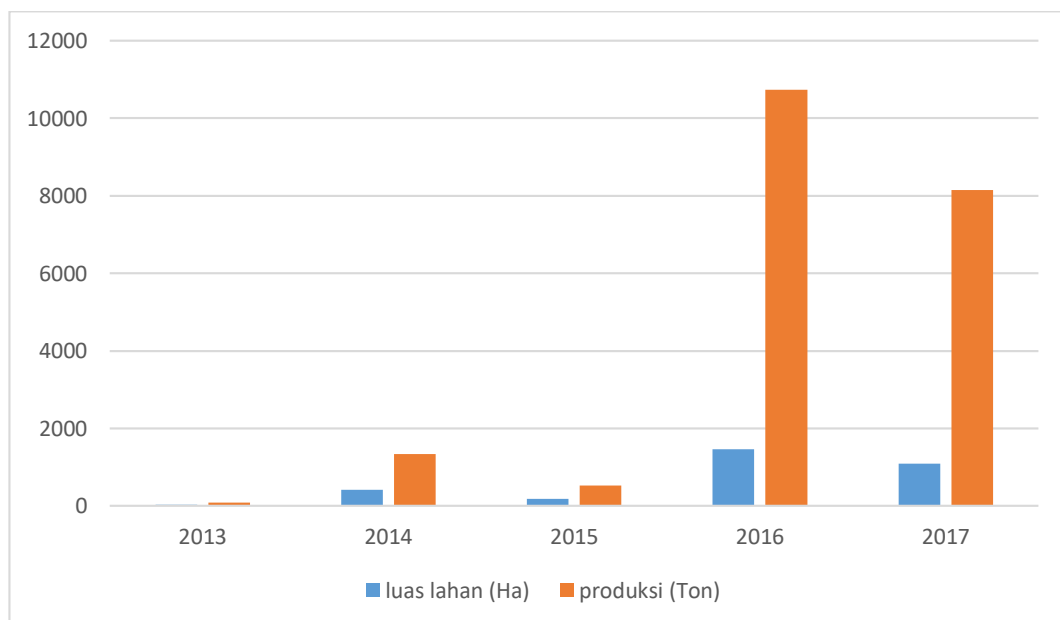
pembukaan kebun sawit dan karet di daerah Seumayam salah satu nama Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya, juga membawa dampak yang sangat positif untuk Kabuapten Aceh Barat Daya. Masalahnya perusahaan kebun sawit dan karet tersebut mempergunakan pulo kayee (salah satu Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya yang terletak di pesisir pantai) sebagai pelabuhan ekspor, sehingga pelabuhan itu disinggahi oleh kapal dari luar. Hal ini bisa dikatakan bahwa jaringan ekonomi Kabupaten Aceh Barat Daya terentang luas.

Tabel 4.2 Perkembangan Ketahanan Pangan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2017

No	JenisTanaman	Produksi (Ton)				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Tahun					
1	Jagung	85,74	13.344,28	526,5	10.729,14	8.115,6
2	Kacang Hijau	13,84	49,07	13,84	-	-
3	Kacang Tanah	233,88	364,47	96,83	94,63	238,79
4	Kedelai	13,83	82,84	-	728,38	286,74
5	Singkong	304,44	586,92	515,70	398,41	534,12
6	Kentang	-	-	-	-	-
7	Ubi	267,5	437,88	251,24	121,72	178,5
8	Padi	172,651	770,97	770,97	98.641,6	140.441,12

Pada table tersebut dapat di lihat bahwa, produksi tanaman pangan jenis padi masih dominan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Hal ini menunjuk kan bahwa pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya di dominasi oleh pertanian jenis padi, kemudian perkembangan produksi (ton) padi di Kabupaten Aceh Barat Daya dari tahun 2013 sampai tahun 2017 adalah sebesar 1.28% selama lima tahun tersebut. Kemudian jenis tanaman yang Dominan berikutnya adalah jenis tanaman jagung

dengan jumlah produksi yang bertambah setiap tahunnya selama lima tahun tersebut, dengan perkembangan jumlah produksi sebesar 0.60% dengan jumlah rata rata selama lima tahun tersebut adalah 6.560.252 (ton) kemudian pada tanaman jenis ubi kayu dengan jumlah rata rata produksi selama lima tahun tersebut adalah 251.368 (ton) Dengan perkembangan produksi sebesar 0,05% walaupun demikian terjadi penurunan pada jenis tanaman pangan umbi kayu pada tahun 2015-2016 setelah mengalami peningkatan pada tahun 2014 dari tahun sebelumnya. Kemudian jenis tanaman pangan dengan jumlah produksi terendah adalah pada jenis tanaman kedelai yang selalu mengalami penurunan setiap tahun dari tahun 2013 sampai tahun 2017 dengan jumlah rata rata produksi terbesar 219.592 Selama lima tahun tersebut.



Gambar 4.1

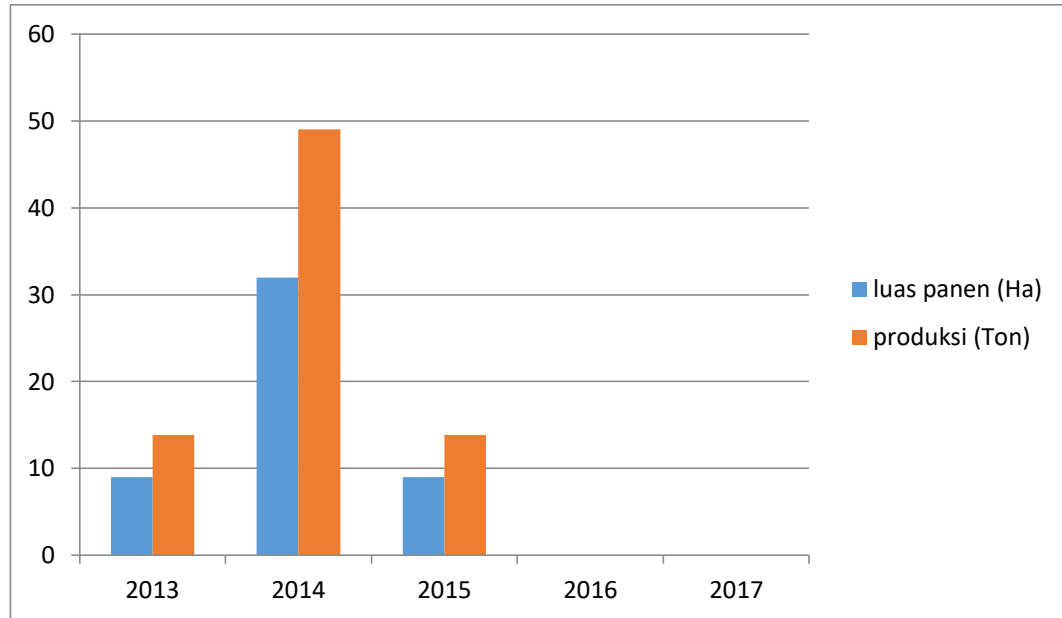
**Grafik perkembangan jumlah produksi dan luas penanaman pangan jenis jagu
ngkabupaten Aceh Barat Daya tahun 2013-2017**

Sumber : Badan Pusat Statistik Nanggroe Aceh Darussalam, data Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Angka Tahun 2017

Pada gambar grafik diatas dapat kita lihat bahwa banyak nya jumlah produksi di tentukan oleh luas lahan. Yang artinya luas lahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah produksi . Berdasarkan data di atas. Jumlah produksi jagung di Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2013 yaitu 85 (ton) dengan jumlah luas lahan yaitu 26 (Ha). Yang kemudian pada tahun 2014 jumlah produksi jagung pada di Kabupaten Aceh Barat Daya mengalami kenaikan dengan jumlah produksi sebesar 1.344,28 (ton). Dimana pada jumlah luas lahan mengalami kenaikan menjadi 415 (Ha) ini artinya kondisi pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2014 mengalami kenaikan hasil panen. Kemudian pada tahun 2015 jumlah produksi jagung di Kabupaten Aceh Barat Daya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu berada pada angka 526,5 (Ton) dengan jumlah luas lahan 187 (Ha). Penurunan jumlah produksi pada tahun ini tidak lain karna disebabkan oleh berkurangnya luas lahan di Kabupaten ini. Yang kemungkinan besar di sebabkan oleh pengalihan fungsi lahan pertanian kepermukiman atau mungkin dengan pengalihan fungsi lahan. Yang dimane sebelumnya di pergunakan untuk menanam jagung kemudian digantikan untuk menanam jenis tanaman lain. Kemudian pada tahun 2016 jumlah produksi jagung mulai stabil berdasarkan dari jumlah produksi tahun sebelumnya yaitu pada angka produksi 10729,14 (Ton) dengan jumlah luas lahan sebesar 1460 (Ha). Dan kemudian di tahun 2017 jumlah produksi jagung kembali mengalami penurunan dengan jumlah produksi sebesar 8115,6 (Ton) dengan jumlah luas lahan 1088 (Ha).

Gambar 4.2

Grafik perkembangan jumlah produksi dan luas panen tanaman pangan jenis kacang hijau Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2017



Gambar 4.2

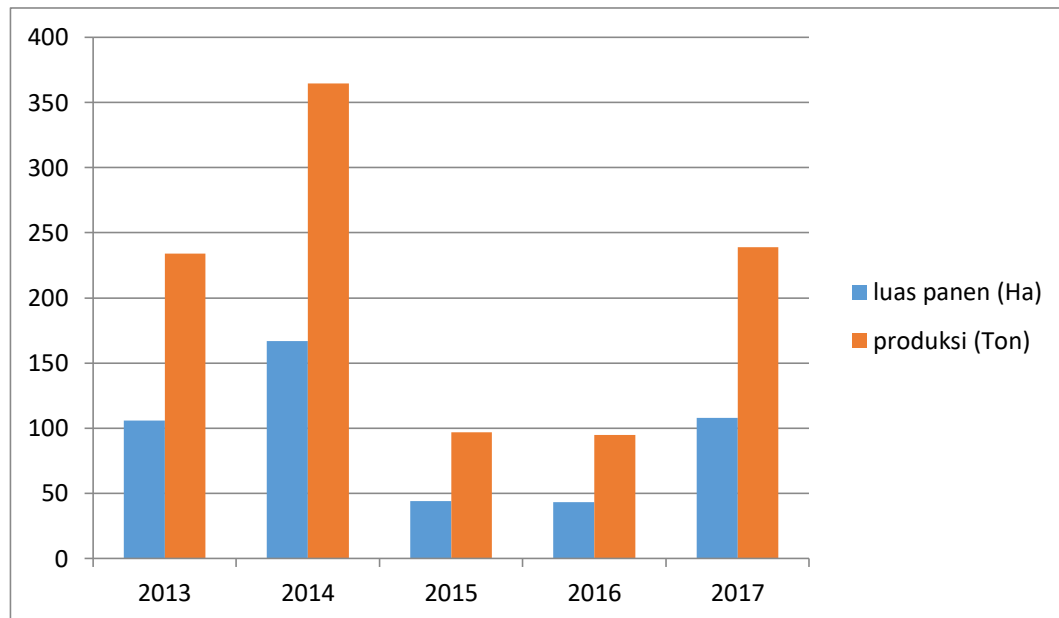
Grafik perkembangan jumlah produksi dan luas panen tanaman pangan jenis kacang hijau Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, Data Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Angka 2017

Pada gambar grafik di atas dapat kita lihat bahwa banyaknya jumlah produksi di tentukan oleh luas lahan. Yang artinya luas lahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah produksi.

Bedasarkan data di atas. Jumlah produksi kacang hijau di Kabupaten aceh Barat Daya pada tahun 2013 yaitu 13,8 (Ton) dengan jumlah luas lahan yaitu 9 (Ha) dan kemudian pada tahun 2014 jumlah produksi kacang hijau di Kabupaten Aceh Barat Daya mengalami kenaikan menjadi 49,07 (Ton) dan luas lahan juga ikut naik menjadi 32 (Ha) dan kemudian pada tahun 2015 jumlah produksi kacang

hijau di kabupaten aceh barat dayakembali mengalami penurunan menjadi 13,84 (Ton) dan luas lahan juga ikut menurun menjadi 9 (Ha) pada tahun 2016 dan 2017 luas lahan dan produksi kacang hijau di Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi tidak yang kemungkinan di akibatkan oleh alih fungsi lahan menjadi tanaman jagung dan jengkol.



Gambar 4.3

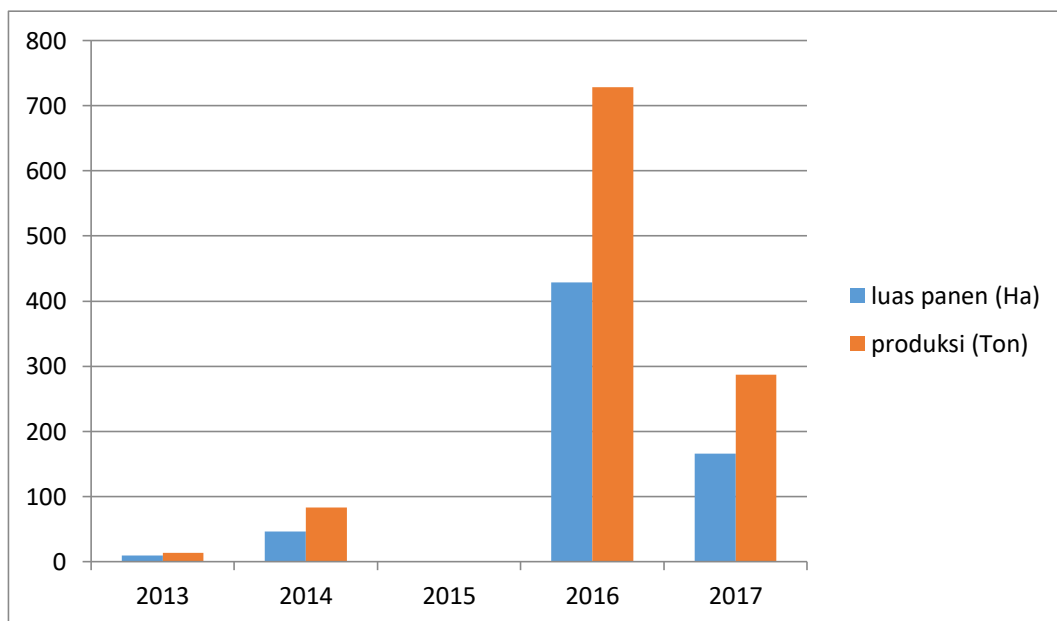
Grafik perkembangan jumlah produksi dan luas panen tanaman pangan jenis kacang Tanah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, Data Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Angka tahun 2017

Pada gambar grafik di atas dapat kita lihat bahwa banyak jumlah produksi ditentukan oleh banyak jumlah luas lahan. Yang artinya luas lahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah produksi

Berdasarkan data diatas. Jumlah produksi kacang tanah di Kabupaten Aceh Barat daya tahun 2013 yaitu sebesar 233,88 (Ton) dengan luas lahan 106 (Ha), dan kemudian pada tahun 2014 jumlah produksi kacang tanah mengalami

kenaikan menjadi sebanyak 364,47 (Ton) dengan total luas lahan 167 (Ha).pada tahun 2015 jumlah produksi kacang tanah di Kabupaten Aceh Barat Daya kembali mengalami penurunan menjadi 96,83 (Ton) dan luas lahan juga ikut turun menjadi 44 (Ha) dan pada tahun 2016 jumlah produksi kacang tanah mengalami penurunan menjadi 94,65 (Ton) dan luas lahan mengalami penurunan menjadi 43 (Ha), dan pada tahun 2017 produksi kacang tanah di Kabupaten Aceh Barat Daya naik lagi menjadi 238,79 (Ton) dengan luas lahan juga ikut bertambah menjadi 108(Ha).



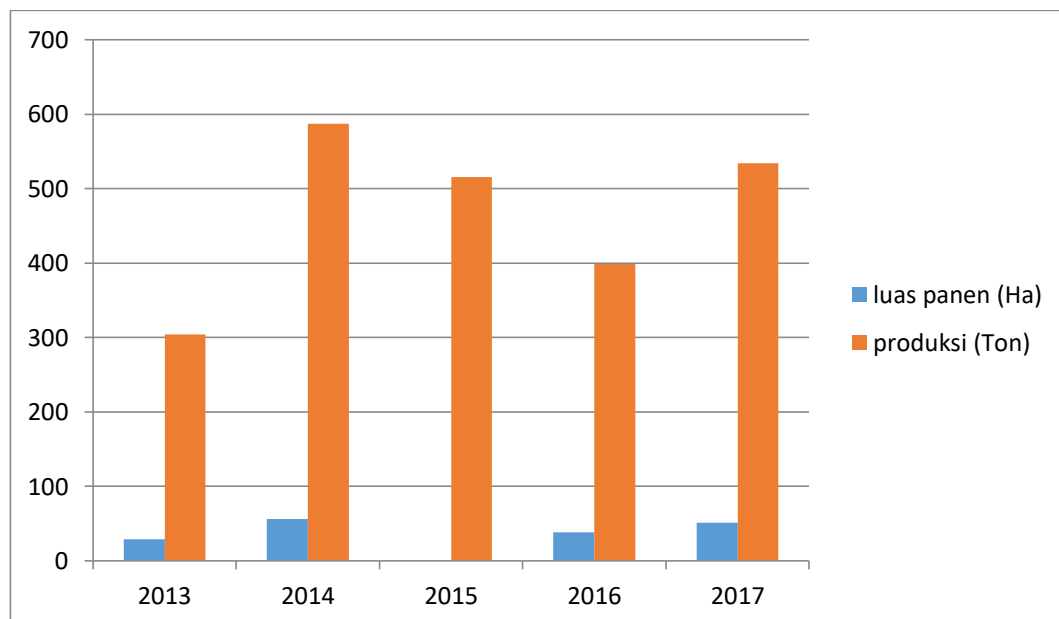
Gambar 4.4

Grafik perkembangan jumlah produksi dan luas panen tanaman pangan jenis Kedelai Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, Data Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Angka tahun 2017

Pada gambar grafik di atas dapat kita lihat bahwa banyak nya jumlah produksi di tentukan oleh luas lahan. Yang artinya luas lahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah produksi

Berdasarkan data di atas, jumlah produksi kedelai di Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2013 yaitu sebesar 13,83 (Ton) dengan jumlah luas lahan yaitu 9 (Ha). Kemudian pada tahun 2014 total produksi kedelai di Kabupaten Aceh Barat Daya naik menjadi 82,84 (Ton) dengan luas lahan yang juga ikut bertambah menjadi 46 (Ha). Pada tahun 2015 produksinya kosong dan luas lahan kosong karena terjadinya alih fungsi lahan ke tanaman lain. Pada tahun 2016 jumlah produksi kedelai sebesar 728,38 (Ton) dengan luas lahan sebanyak 429 (Ha) dan di tahun 2017 jumlah produksi kembali turun menjadi 286,74 (Ton) dengan luas lahan yang juga ikut turun menjadi 166 (Ha).



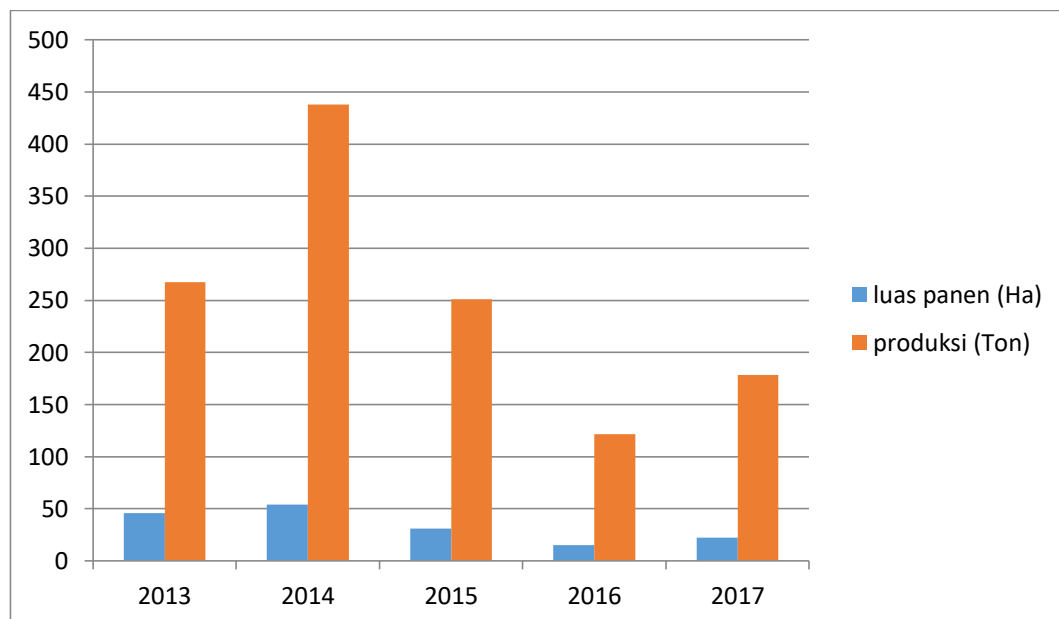
Gambar 4.5

Grafik perkembangan jumlah produksi dan luas panen tanaman pangan jenis singkong Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, Data Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Angka tahun 2017

Pada grafik di atas dapat kita lihat bahwa produksi singkong sangat banyak walaupun luas lahan yang dimiliki tidak sebanyak luas lahan tanaman lain.

Berdasarkan data diatas jumlah produksi singkong di kabupaten aceh barat daya pada tahun 2013 sebanyak 304,44 (Ton) dengan total luas lahan sebesar 29 (Ha) kemudian pada tahun 2014 produksi singkong naik menjadi 586,92 (Ton) dengan total luas lahan juga ikut naik sebesar 56 (Ha) pada tahun 2015 produksi singkong mengalami penurunan menjadi 515,70 (Ton) dengan luas lahan yang juga ikut turun menjadi 49 (Ha) dan pada tahun 2016 produksi singkong kembali turun lagi menjadi 398,41 (Ton) dengan luas lahan dan juga ikut turun menjadi 38(Ha) dan kemudian pada tahun 2017 produksi singkong kembali mengalami kenaikan menjadi 534,12 dengan luas lahan juga ikut naik menjadi 51 (Ha)



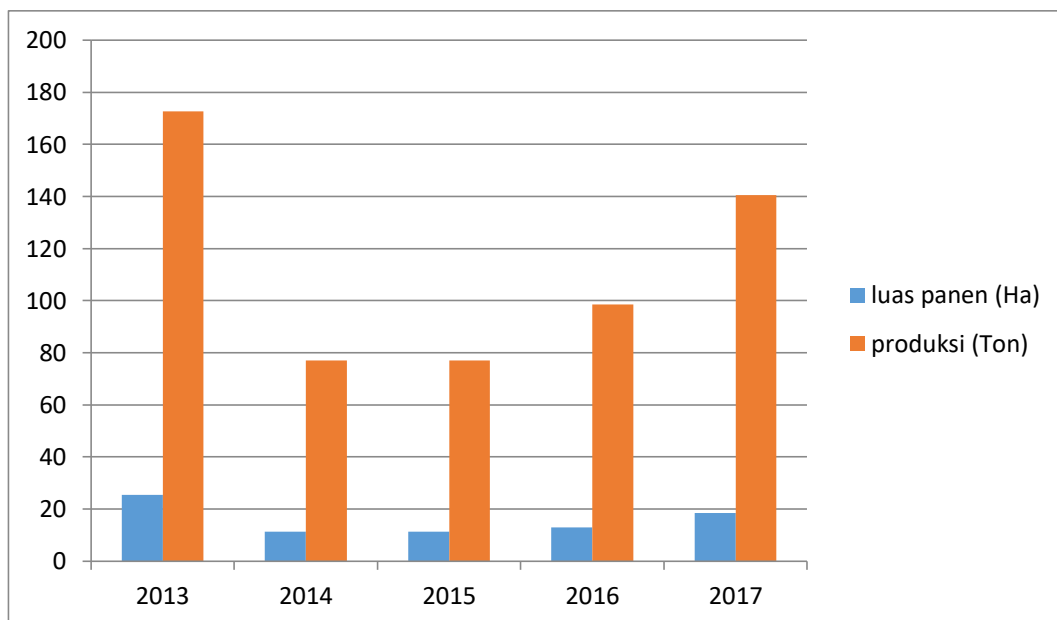
Gambar 4.6

Grafik perkembangan jumlah produksi dan luas panen tanaman pangan jenis ubi Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, Data Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Angka tahun 2017

Potensi pertanian jenis Ubi di Kabupaten Aceh Barat Daya sangat bagus, hal ini di buktikan dengan jumlah produksi ubi dalam lima tahun terakhir sangat banyak. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar grafik di atas.

Pada tahun 2013 produksi ubi di Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 267.5 (ton) dengan total luas lahan sebesar 46 (ha). Kemudian di tahun 2014 produksi ubi di Kabupaten Aceh Barat Daya naik menjadi 437.88 (ton) dengan total luas lahan menjadi yang juga naik menjadi 4 (ha). Pada tahun 2015 produksi ubi di Kabupaten Aceh Barat Daya turun menjadi 251.24 (ton) dengan total luas lahan yang juga ikut turun menjadi 31(ha). Kemudian pada tahun 2016 produksi ubi di Kabupaten Aceh Barat Daya turun lagi menjadi 121.72 (ton) dengan total luas lahan yang juga ikut turun menjadi 15 (ha). Dan pada tahun 2017 produksi ubi di Kabupaten Aceh Barat Daya naik menjadi 178.5 (ton) dengan total luas lahan yang juga bertambah menjadi 22 (ha).



Gambar 4.7

Grafik perkembangan jumlah produksi dan luas panen tanaman pangan jenis Padi Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, Data Kabupaten Aceh Barat Daya dalam angka tahun 2017

Di Kabupaten Aceh Barat Daya jumlah produksi tanaman pangan yang paling banyak adalah padi. Berdasarkan data diatas jumlah produksi padi di Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2013 adalah sebesar 172.651 (ton) dengan luas lahan sebanyak 25.521 (ha). Kemudian pada tahun 2014 jumlah produksi padi di Kabupaten Aceh Barat Daya turun menjadi 77.079 (ton) dengan luas lahan yang juga ikut turun menjadi 11.358 (ha). Dan pada tahun 2015 produksi padi di Kabupaten Aceh Barat Daya tetap sebesar 77.079 (ton) dan jumlah luas lahan yang naik menjadi 11.368 (ha). Kemudian pada tahun 2016 jumlah produksi padi di Kabupaten Aceh Barat Daya naik menjadi 98.641,6 dengan luas lahan yang juga ikut naik menjadi 13.050 (ha). Dan di tahun 2017 jumlah produksi di Kabupaten Aceh Barat Daya naik lagi menjadi 140.441,12 (ton) dengan jumlah luas lahan yang juga ikut naik sebesar 18.573 (ha).

4.2. Strategi Produksi Pangan Dalam Mendukung

4.2.1. Perkembangan Ekonomi di Kabupaten Aceh Barat Daya

Aceh Barat Daya merupakan sebuah kabupaten yang terletak di wilayah pesisir pantai barat selatan provinsi aceh, Aceh Barat Daya awalnya merupakan bagian dari kabupaten Aceh Selatan, dan akhirnya memisahkan diri dari kabupaten induknya dan membentuk kabupaten sendiri. Aceh Barat Daya Lahir pada 10 April 2002 sesuai dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2002, dengan letak geografis 96° 34' 57" – 97° 09 '19" Bujur Timur dan 3° 34' 24" - 4° 05' 37" Lintang Utara. Aceh Barat Daya memiliki Luas 1.882,05 km², Aceh barat

daya memiliki 9 kecamatan dengan 132 gampong Serta jumlah penduduk 147.924 jiwa (data BPS 2013).

Aceh Barat Daya memiliki Ibu kota Blangpidie, serta blangpidie dijadikan sentra pemerintahan dan perekonomian. Selain itu, juga diarahkan pengembangannya untuk mendukung kegiatan perkotaan seperti perdagangan, jasa dan permukiman. Pada intinya blangpidie manjadi CBD (*central business district*) nya Aceh Barat Daya. Dengan jumlah PDRB senilai Rp. 736.958,44 miliar (2012) dan pendapatan perkapita sebesar Rp14.189.981 pertahun dan Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,27 % tentu menunjukkan potensi besar pada sebuah kabupaten yang kini berusia 14 tahun pada 2016 ini.

Potensi sumber daya alam dan keunggulan komparatif yang dimiliki Aceh Barat Daya bakal menjadi pusat perdagangan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan antardaerah di Aceh, terkhusus pada jalur pantai barat selatan. Hal ini tidak lepas dari letak strategis kabupaten ini di pantai barat selatan provinsi aceh. Pertimbangan ini sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya ditinjau dari aspek pertumbuhan ekonomi, dimana Kabupaten ini memiliki kawasan AgropolitanopU untuk pengembangan sektor pertanian atau perkebunan. Lalu ada juga kaopwasan perkotaan sebagai pusat perekonomian, perdagangan, jasa dan permukiman.

Di wilayah pesisir juga ada kawasan minapolitan yang ruangnya dapat dimanfaatkan untuk produksi perikanan tangkap, perikanan tambak, industri pengolahan hasil laut, konservasi kelautan dan tentunya pariwisata. Selama akhir periode 2015-2016 perkembangan tempat rekreasi yang menjadi daya tarik wisatawan berkembang sangat pesat, seperti pulau gosong yang menawarkan

keindahan bawah laut, serta ikan yang berenang di antara karang. Kabupaten dengan julukan Nanggroe Breuh Sigupai ini juga memiliki potensi pertambangan cukup besar terutama bijih besi dan emas.

Sudah jelas dengan berbagai potensinya akan menjadikan kabupaten ini menjadi sebuah kabupten yang patut di perhitungkan di wilayah pantai barat selatan provinsi aceh. Kini tinggal menunggu kebijakan dan arahan dari pemimpin setempat apakah dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki agar dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan serta menaikkan taraf kehidupan serta kesejahteraan rakyat aceh barat daya. Hanya pemimpin yang baik, cerdas dan tepatlah yang dapat melihat potensi ini sebagai dasar dari kemajuan sebuah daerah.

a. komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap ketahanan pangan

komitmen pemerintah yang merupakan jaminan illegal dan normotif terhadap ketahanan pangan dapat dilihat dari regilasi maupun dokumen kebijakan ketahanan pangan yang ada di kabupaten aceh barat daya. Hal ini tertuang dalam kebijakan umum belanja daerah kabupaten aceh barat daya urusan ketahanan pangan yaitu. Peningkatan ketahanan pangan melalui pemetaan daerah rawan pangan mengendalikan dan menjaga ketersediaan pangan serta menjaga kelancaran distribusi pangan daerah dan pengendalian harga pangan. Komitmen terhadap pemerintah daerah terhadap program peningkatan ketahanan pangan tergambar dengan dikeluarkannya surat edaran dari bupatiagar masyarakat tidak mengkonsumsi beras satu hari dalam seminggu atau yang lebih dikenal dengan istilah nonasari serta komitmen pemerintah dalam rangka panganekaragaman

dalam konsumsi pangan berbasis pangan local secara umum visi misi kabupaten aceh barat daya telah dinyatakan secara gamblang dalam rencana pembangunan jangka menengah yaitu: ‘Tetrujutnya Masyarakat Aceh Barat Daya Yang Sejahtera, Adil, Mandiri Religius Dan Terdepan’ **Sejahtera** merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan social ekonomi masyarakat telah terpilih secara keadilan dan berimbang yang di tunjang oleh keamanan dan kestabilitas yang kondusif sehingga masyarakat merasa nyaman dalam beraktifitas untuk memenuhi kehidupannya

Mandiri tidak berarti menutup diri dari bantuan pihak lainakan tetapi dikmaksud terciptanya kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Aceh Barat Daya yang mapu melihat, berfikir, bertindak serta mamfaatkan semua peluang setiap pembangunan daerah secara berimbang

Religius artinya bahwa dalam setiap tindakan pembangunan daerah selalu mengedepankan nilai social keamanan sebagai suatu kegiatan yang perlu di kembangkan, diperthankan dan di tingkatkan untuk menghadapi pengaruh negative untuk perusahaan global sehingga kedepan akan melahirkan pembangunan daerah yang seimbang antara pembangunan ekonomi.

Terdepan artinya dalam kurun waktu lima tahun kedepan kabupaten aceh barat daya menjadi kabupten di pulau aceh yang terdepan dalam melakukan inovasi pemerintah, pembangunan ekonomi , social budaya, politik, hokum dan ham, keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Adanyan sosialisasi peningkatan kethanan pangan secara berkala

socialisasi peningkatan ketahanan pangan di kabupaten aceh barat daya dilakukan untuk meningkat kan pengetahuan dan kesadaran masyarkat tentang

pangan, ketrampilan mengelolal pangan dan konsumsi dengan gizi seimbang, sanitasi dan keamanan pangna , serta pengelolaan sumberdaya keluarga untuk meningkatkan gizihal ini diwujut kan program tahunan antara lain terdapat beberapa kegiatan yaitu; penanganan daerah rawan pangan, analisis dan pola konsumsi dan suplay pangan

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dengan dilihat hasil kesimpulan yang telah di bahas, maka dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut: Pendapatan paling besar di Kabupaten Aceh Barat Daya berasal dari sektor pertanian. Produksi tanaman pangan yang paling banyak adalah padi, dengan total luas lahan 102,965 Ha, dan termasuk sektor yang memiliki luas lahan terluas dibandingkan tanaman pangan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya di dominasi oleh pangan jenis padi. Potensi sumber daya alam dan keunggulan komperatif yang dimiliki Aceh Barat Daya menjadikan daerah tersebut sebagai pusat perdagangan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan antar daerah di Aceh, khususnya pantai Barat Selatan.

5.2 Saran

1. Dirasa sangat perlu sekali untuk pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya segera merancang dan menerbitkan Peraturan Daerah tentang alih fungsi lahan serta memperketat perijinan alih fungsi lahan pertanian. Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut serta memperketat alih fungsi lahan pertanian diharapkan mampu melindungi lahan pertanian saat ini dan bisa menjaga produktivitas pangan yang setiap tahun tetap meningkat.
2. Diperlukan strategi khusus bagi pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pangan. Hal ini bisa ditempuh dengan adanya program khusus yang menunjang beras bulog sebagai pengganti makanan pokok. Dengan adanya beras bulog sebagai pengganti

makanan pokok diharapkan mampu mengurangi konsumsi beras sebagai makanan karbohidrat utama bagi masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya.

3. Untuk mengatasi faktor kelemahan dalam hal Sumber Daya Manusia penyuluh di Kabupaten Malang, disarankan agar pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya melakukan pengadaan tenaga fungsional penyuluh dan memberikan pendidikan seperti bimbingan teknis (bimtek) kepada tenaga penyuluh yang ada. Dengan keikutsertaan aparatur dalam pendidikan, maka akan diperoleh suatu aparatur yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik;(2016) Dalam Angka, Aceh Barat Daya
- Bustanul Arifin; (2007) *Diagnosis Ekonomi Politik Pangan Dan Pertanian*. Rajawali Pers, Jakarta
- Carla Poli; (2003) Pengantar Ilmu Ekonomi, PT Prenhallindo, Jakarta
- Darmawati; (2014) Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketahanan Desa. Meulaboh
http://www.bps.go.id/aboutus.php?id_subyek=11&tabel=1&fl=2
- <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/03/140000126/19-4-juta-orang-indonesia-tidak-dapat-memenuhi-kebutuhan-pangan>.
- <http://mediaamirulindonesia.blogspot.com/2012/06/konsep-dan-metode-perhitungan.html>
- Jhingan, M.L. 2007. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Edisi 1. Cetakan Ketujuh. Rajawali Pers. Jakarta
- Josohardjono, (2003) Ekonomi Produksi GMU Pers, Yogyakarta
- Kesejahteraan Petani. MMA-UGM Yogyakarta, Ilmu Pertanian Vol.12 No.2:152-164
- Lassa, Jonnatan. (2005). *Politik ketahanan Pangan Indonesia* □ *jurnal*
- Lastry, Yenny. 2016. *Analisis Pola Konsumsi Beras Rumah Tangga Di Kota Bogor*. Skripsi Sarjana Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor.
- Raisul, 2010 Penelitian Kuantitatif: komunikasi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial, Jakarta, Kencana Prenama Media Grup
- Winarno (2005) *Ketahanan Pangan Berbasis Produksi dan Kesejahteraan Petani*. MMA-UGM Yogyakarta, Ilmu Pertanian Vol.12 No.2, : 152 – 164
- Zakiah. 2016. Ketahanan Pangan Rumah Tangga Miskin, Aceh. Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Ketahanan Energi; 2016 Nov 15; Banda Aceh, Indonesia. Lhokseumawe (ID): Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikus Saleh Aceh. Halaman. 757-767
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2012–2017. *Nilai Tukar Petani*. Subdirektorat Statistik Harga Produsen dan Konsumen Pedesaan. Badan Pusat Statistik. Jakarta